

STATISTIK

PEMUDA

PROVINSI JAWA TENGAH

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

STATISTIK

P E M U D A

PROVINSI JAWA TENGAH

2016



bps.jawabps.go.id

STATISTIK PEMUDA PROVINSI JAWA TENGAH 2016

ISBN : 978-602-5419-02-7
Katalog : 4103006.33
Nomor Publikasi : 33520.1711
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 Cm
Jumlah Halaman : xvi + 117 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Penyunting :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak Oleh :

CV. Pelita

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya pikir revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda, jika ingin melihat masa depan suatu bangsa maka dapat dilihat bagaimana kondisi pemuda hari ini. Oleh karena itu, membangun bangsa dalam jangka panjang pada hakekatnya adalah membangun pemuda.

Membangun pemuda diperlukan pengetahuan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemudaan, diperlukan perencanaan program yang realistis dan terarah serta didukung oleh tersedianya data statistik mengenai pemuda. Publikasi Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2016 ini secara khusus mengulas berbagai kondisi pemuda di Jawa Tengah. Sumber data untuk publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2016 dan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Semarang, Agustus 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Dr. MARGO YUWONO, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	xi
Gambaran Umum Pemuda Jawa Tengah	xiii
Infografis	1
1. Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Sistematika Penulisan	9
2. Metodologi	11
2.1. Sumber Data	11
2.2. Konsep dan Definisi	12
2.3. Metode Analisis	18
3. Profil Demografi	19
3.1. Jumlah Pemuda dan Jumlah Penduduk Jawa Tengah	22
3.2. Pemuda menurut Jenis Kelamin	24
3.3. Pemuda menurut Kelompok Umur	24
3.4. Pemuda menurut Status Perkawinan	25
3.5. Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga	27

4. Pendidikan	31
4.1. Partisipasi Sekolah	33
4.2. Angka Buta Huruf	38
4.3. Rata-Rata Lama Sekolah	39
4.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	42
4.5. Akses Internet	43
5. Kesehatan dan Keluarga Berencana	47
5.1. Keluhan Kesehatan	49
5.2. Angka Kesakitan	52
5.3. Lama Sakit	53
5.4. Cara Berobat	54
5.5. Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana	57
5.6. Umur Perkawinan Pertama Pemuda Perempuan	59
6. Ketenagakerjaan	63
6.1. Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi	66
6.2. Lapangan Usaha	71
6.3. Status Pekerjaan	72
6.4. Jam Kerja	75
6.5. Tingkat Pengangguran Terbuka	77
Daftar Pustaka	81
Lampiran	83

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Persentase Pemuda Jawa Tengah, 2012-2016	23
Gambar 3.2 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2016	26
Gambar 3.3 Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Status Perkawinan, 2016	27
Gambar 3.4 Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016	29
Gambar 4.1 Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2016	36
Gambar 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016	40
Gambar 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda menurut Kabupaten/Kota, 2016	41
Gambar 5.1 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016	51
Gambar 5.2 Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016	52
Gambar 5.3 Persentase Pemuda yang Mengalami Gangguan Kesehatan menurut Lama Sakit dan Tipe Daerah, 2016	54

Gambar 5.4	Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016	56
Gambar 5.5	Persentase Pemuda Perempuan menurut Status Penggunaan Alat KB dan Tipe Daerah, 2016	58
Gambar 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016	68
Gambar 6.2	Proporsi Pemuda Setengah Pengangguran menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016	77
Gambar 6.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016	78

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2016	22
Tabel 3.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Tipe Daerah, 2014-2016	24
Tabel 3.3 Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2016	25
Tabel 3.4 Proporsi Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016	28
Tabel 4.1 Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, 2016	34
Tabel 4.2 Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, 2016	35
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016	37
Tabel 4.4 Angka Buta Huruf Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015-2016	39
Tabel 4.5 Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016	42
Tabel 4.6 Proporsi Pemuda yang Menggunakan Internet menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2016 ...	44
Tabel 5.1 Persentase Pemuda yang Tidak Berobat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Berobat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016	55

Tabel 5.2	Persentase Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Jalan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016	57
Tabel 5.3	Persentase Pemuda Perempuan menurut Tipe Daerah dan Umur Perkawinan Pertama, 2016	59
Tabel 5.4	Persentase Pemuda Perempuan menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Umur Kawin Pertama, 2016	60
Tabel 6.1	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2016	67
Tabel 6.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016	68
Tabel 6.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2016	71
Tabel 6.4	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, 2016	72
Tabel 6.5	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2016	73
Tabel 6.6	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2016	74
Tabel 6.7	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016	75
Tabel 6.8	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2016	76
Tabel 6.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2016,	79

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Tabel	Judul	Hal
3.1.1-3.1.3	Proporsi Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016	85-87
3.2.1-3.2.3	Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Jawa Tengah 2016	88-90
3.3	Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan Jawa Tengah 2016	91
3.4	Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Jawa Tengah 2016	92
4.1	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Sekolah, Jawa Tengah 2016	93
4.2	Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Status Sekolah Jawa Tengah 2016	94
4.3	Persentase Pemuda yang Masih Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Jawa Tengah 2016	95
4.4	Proporsi Pemuda yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin Kelompok Umur dan Tipe Daerah, Jawa Tengah 2016	96
4.5	Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Damatkan, Jawa Tengah 2016	97
4.6	Proporsi Pemuda Umur 16-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016	98
4.7	Proporsi pemuda yang masih Bersekolah yang mengakses internet, menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin, Jawa Tengah 2016	99

5.1.1-5.1.3	Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016	100-102
5.2.1-5.2.3	Angka Kesakitan Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016	103-105
5.3.1-5.3.3	Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Sakit, Jawa Tengah 2016	106-108
5.4.1-5.4.3	Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, Jawa Tengah 2016	109-111
5.5.1-5.5.3	Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi dalam Program KB, Jawa Tengah 2016	112-114
5.6.1-5.6.3	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB yang Digunakan, Jawa Tengah 2016	115-117

GAMBARAN UMUM PEMUDA JAWA TENGAH

Pemuda merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pembangunan. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Berdasarkan hasil Susenas 2016, jumlah pemuda di Jawa Tengah adalah 7,42 juta jiwa atau sebanyak 21,85 persen dari total penduduk di Jawa Tengah.

Tingginya persentase pemuda dapat memberikan gambaran tingginya potensi sumber daya manusia penggerak pembangunan. Dalam kurun waktu lima tahun, persentase pemuda di Jawa Tengah mengalami penurunan, dari 22,27 persen pada tahun 2012 menjadi 21,85 persen pada tahun 2016.

Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan jumlah pemuda laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin pemuda di Jawa Tengah tahun 2017 adalah 102,80 persen, yang berarti bahwa dari 100 pemuda perempuan di Jawa Tengah terdapat 103 pemuda laki-laki. Berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan lebih besar dibandingkan persentase pemuda di perdesaan. Potensi pemuda baik di perkotaan maupun perdesaan ini akan menjadi efektif bagi percepatan pembangunan jika pemuda mempunyai kualitas yang tinggi.

Dilihat dari sisi pendidikannya, masih ada sebanyak 0,57 persen pemuda yang tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal. Sementara itu jika dilihat dari kelompok umurnya, pada kelompok umur 16-18 tahun masih terdapat pemuda yang tidak/belum pernah sekolah, yaitu sebanyak 0,33 persen. Ini mengindikasikan bahwa

pembangunan pendidikan masih belum menyentuh seluruh pemuda di Jawa Tengah. Secara umum, rata-rata lama sekolah pemuda di Jawa Tengah adalah 7,48 tahun, yang berarti rata-rata pemuda di Jawa Tengah telah bersekolah sampai kelas 2 SMP. Rata-rata lama sekolah pemuda perkotaan lebih tinggi dibanding pemuda perdesaan, yang berarti masih ada diskrepansi pendidikan antara perkotaan dan perdesaan.

Tingkat pendidikan secara langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memahami aspek kehidupan lain seperti pola hidup, kesehatan dan ketenagakerjaan. Secara umum tingkat kesehatan pemuda Jawa Tengah dapat dilihat dari angka kesakitan. Angka kesakitan pemuda di Jawa Tengah tahun 2016 adalah 9,50 yang berarti sebanyak 9,50 persen pemuda di Jawa Tengah mengalami keluhan kesehatan sehingga terganggu aktivitas sehari-harinya. Status kesehatan pemuda laki-laki lebih baik dibandingkan status kesehatan pemuda perempuan, ini terlihat dari lebih tingginya angka kesakitan pemuda perempuan dibandingkan pemuda laki-laki.

Status Kesehatan secara tidak langsung berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Semakin baik status kesehatan seseorang maka akan semakin tinggi kesempatan untuk terjun ke dunia kerja dan semakin tinggi pula tingkat produktivitas tenaga kerja. Partisipasi Pemuda di Jawa Tengah dalam kegiatan ekonomi cukup besar, ini terlihat dari tingginya persentase pemuda yang berstatus bekerja, yaitu sebanyak 53,55 persen. Persentase pemuda laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja, perbedaan tanggung jawab dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi lebih tingginya persentase pemuda laki-laki yang bekerja.

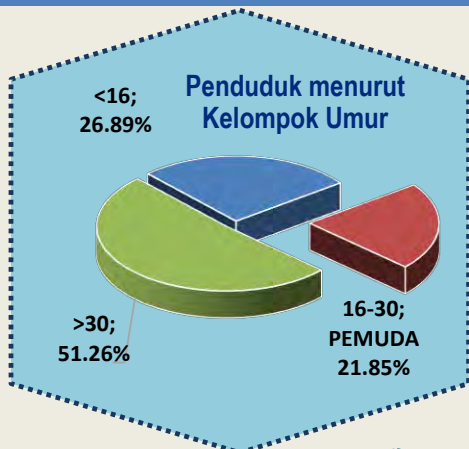
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda laki-laki adalah sebesar 74,77 persen sedangkan TPAK pemuda perempuan adalah 47,49 persen. Dilihat dari kelompok umur, TPAK pemuda laki-laki meningkat sejalan dengan meningkatnya umur pemuda, sedangkan pada pemuda perempuan kecenderungan TPAK terbesar pada kelompok umur 21-25 tahun. Semakin tua umur seseorang semakin tinggi tanggung

jawabnya terhadap keluarga, ini merupakan salah satu faktor penyebab lebih tingginya TPAK pemuda pada kelompok umur lebih tua.

Sejalan dengan lebih tingginya TPAK pemuda laki-laki, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan TPT pemuda perempuan, yaitu 13,46 persen berbanding 11,51 persen. Sementara itu dilihat dari tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan dan perdesaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan tingkat pendidikan, TPT pemuda pada pendidikan Perguruan Tinggi adalah yang paling besar dibanding jenjang pendidikan yang lain, yaitu 19,73 persen. Pada tingkat pendidikan rendah (SD) menunjukkan TPT paling rendah, yaitu 5,85 persen.

<https://jateng.bps.go.id>

STATISTIK PEMUDA PROVINSI JAWA TENGAH 2016



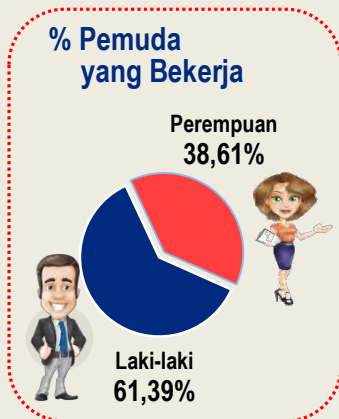
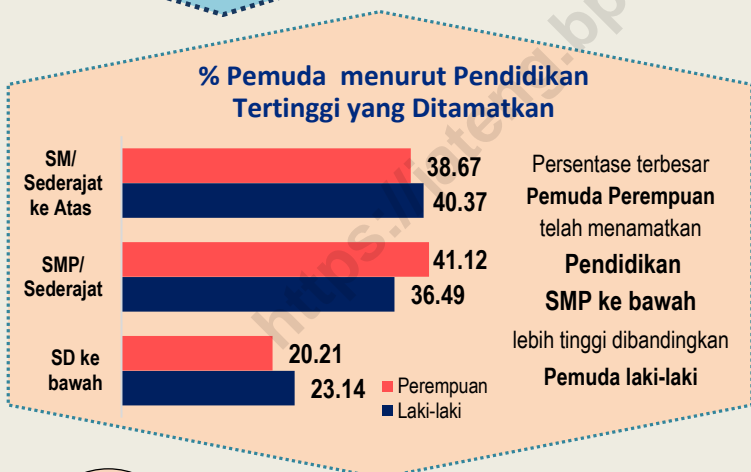
Jumlah Pemuda

Persentase Pemuda Jawa Tengah Tahun 2016
21,85%

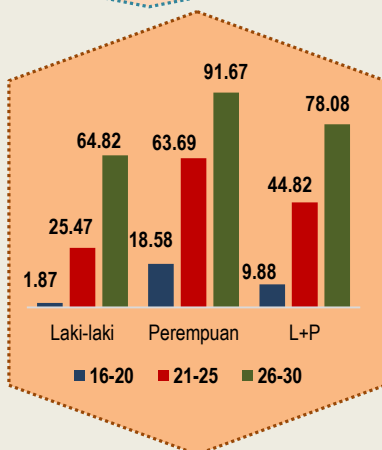


Perempuan
3 658,23 ribu

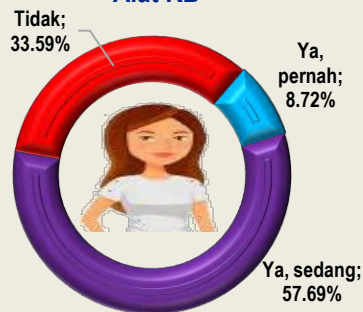
Laki-laki
3 760,55 ribu



Proporsi Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki



% Pemuda Perempuan menurut Status Penggunaan Alat KB





PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan Negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global.

Menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Berbekal kemampuan dan kecakapannya, pemuda mampu menjadi bagian dalam proses pembangunan yang mandiri, kreatif dan berkomitmen. Apabila peran tersebut sudah mampu dijalankan dengan baik, yaitu penuh komitmen dan konsistensi untuk senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat, serta derap langkah memainkan peran tersebut didasari ilmu dan nilai-nilai agama, maka menjadi harapan besar proses pembangunan akan berhasil mensejahterakan rakyat.

Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat penting atas setiap peristiwa yang terjadi. Peran penting pemuda telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun sekaligus membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Fakta historis ini menjadi salah satu bukti bahwa pemuda selama ini mampu berperan aktif sebagai pionir dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Bab II Pasal 3 Undang-Undang Kepemudaan yang menyebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat demikian kompleksnya tujuan pembangunan pemuda tersebut, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda menuangkan tujuannya dalam Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang berbunyi “Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing”. Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mempunyai pengertian “memiliki kemampuan berkompetensi yang dihasilkan melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda” yang terus menerus dikembangkan sehingga dapat

mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia dikancah kompetisi global. Di dalam visi tersebut, pemuda Indonesia harus diberdayakan menjadi pemuda yang cerdas, bermoral baik, berkarakter, dan mandiri serta memiliki kemampuan berkompetisi di era globalisasi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan harus didukung oleh tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai bahan perencanaan, target/sasaran pembangunan, pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemuda. Publikasi Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2016 menyajikan gambaran makro mengenai kondisi dan situasi pemuda Indonesia baik tingkat nasional maupun provinsi pada tahun 2016.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2016 bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci dan menyeluruh mengenai profil pemuda di Jawa Tengah. Profil pemuda dalam publikasi ini dilihat dari sisi demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan program pemberdayaan pemuda. Beberapa indikator penting yang disajikan dalam publikasi ini antara lain dalam aspek demografi menyangkut distribusi pemuda, rasio jenis kelamin, status perkawinan, keberadaan pemuda sebagai kepala rumah tangga. Aspek pendidikan mencakup partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan akses internet. Aspek kesehatan mencakup keluhan kesehatan, angka kesakitan, lama sakit, cara berobat, perkawinan pertama, dan partisipasi dalam program keluarga berencana. Aspek ketenagakerjaan menyajikan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan/upah/gaji bersih.

Selanjutnya aspek program pemberdayaan pemuda menyajikan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan melalui berbagai macam program dan kegiatan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan,

kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Publikasi ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan potensi, kualitas, dan dinamika pemuda menurut wilayah kabupaten/kota serta jenis kelamin.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2016 secara sistematis disajikan dalam enam bagian. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari keseluruhan isi publikasi. Uraian yang rinci disajikan dalam bab-bab sesuai tema bahasan dari publikasi. Bagian pertama (Bab I) menyajikan latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian. Metodologi mencakup sumber data, konsep dan definisi serta metode analisis disajikan pada bagian kedua (Bab II). Bagian berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran pemuda dari aspek demografi (Bab III), pendidikan (Bab IV), kesehatan (Bab V), dan ketenagakerjaan (Bab VI).



METODOLOGI



Metodologi

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2016 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2016. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2016, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi pemuda dari sisi demografi, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2016 yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan pemuda.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial

dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2011-2014, Susenas dilaksanakan secara triwulanan (triwulan I–IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan secara bergiliran setiap 3 tahun sekali. Sedangkan mulai tahun 2015 Susenas dilaksanakan satu tahun dua kali yaitu pada bulan Maret dan September.

Data yang dikumpulkan melalui Susenas Kor antara lain keterangan umum anggota rumah tangga (anggota ruta), yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan status perkawinan; keterangan tentang kesehatan; keterangan pendidikan anggota ruta 5 tahun ke atas; keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota ruta 10 tahun ke atas; dan keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin. Selain itu Susenas Kor juga mengumpulkan data mengenai keterangan perumahan yang mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi untuk memasak; dan keterangan sosial ekonomi lainnya, antara lain mencakup pemanfaatan fasilitas program pemberdayaan masyarakat miskin (raskin, kartu sehat, dan sejenisnya), pemanfaatan fasilitas kredit, ketersediaan jaminan kesehatan dan aset dan jaminan rumah tangga; dan keterangan teknologi komunikasi dan informasi.

2.2 Konsep dan Definisi

- a. **Pemuda** adalah penduduk berumur 16-30 tahun.
- b. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

c. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

d. **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

e. **Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

f. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

g. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara

dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

h. Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.

i. Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

j. Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar. **Masih bersekolah** adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

k. Pendidikan:

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat, dan PT. **Pendidikan Non Formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

l. Tamat Sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

m. Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP umum, madrasah tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), madrasah aliyah, dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pascasarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

n. Dapat Membaca dan Menulis adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

o. Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf *Braille*. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- p. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dan lain lain.
- q. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- r. **Angkatan Kerja Pemuda** adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar.

Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dsb.

- s. **Bukan Angkatan Kerja Pemuda** adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- t. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.
- u. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh/karyawan tetap atau buruh/karyawan.
- v. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- w. **Angka Partisipasi Sekolah** adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SM).
- x. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur dibatasi 16-30 tahun.

- y. **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan. TPT dihitung dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

- z. **Angka Ketergantungan Penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif (usia < 15 tahun dan usia > 64 tahun) pada penduduk usia produktif (15–64 tahun).

2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai pemuda selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan lampiran tabel untuk melihat data pada tingkat kabupaten.



PROFIL DEMOGRAFI

Profil Demografi

Pemuda merupakan bagian dari penduduk usia produktif. Selain itu, pemuda menjadi salah satu sumber potensial dalam proses pembangunan bangsa yang memegang peranan penting sebagai sumber kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut (Wahyu Ishardino Satries). Pada generasi sekarang, pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional. Hal tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif,

kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Bab ini memberikan gambaran beberapa aspek penting demografis pemuda di Jawa Tengah, yaitu: jumlah, distribusi, dan struktur/komposisi pemuda yang disajikan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan. Pembahasan profil pemuda diuraikan lebih rinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, status perkawinan, dan hubungan dengan kepala rumah tangga.

3.1 Jumlah Pemuda dan Jumlah Penduduk Jawa Tengah

Jumlah pemuda di Jawa Tengah adalah 7,42 juta jiwa atau 21,85 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Persentase pemuda di Jawa Tengah merupakan yang paling kecil dibanding kelompok umur lainnya, kelompok umur kurang dari 16 tahun sebanyak 9,13 juta jiwa atau sekitar 26,89 persen dan kelompok umur lebih dari 30 tahun sebanyak 17,41 juta jiwa atau sekitar 51,26 persen dari penduduk Jawa Tengah.

Tabel 3.1
Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2016

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<16	4.227,81	26,52	4.903,26	27,22	9.131,07	26,89
16-30	3.636,74	22,81	3.782,05	21,00	7.418,79	21,85
>30	8.079,76	50,67	9.328,16	51,78	17.407,92	51,26
Total	15.944,31	100,00	18.013,46	100,00	33.957,78	100,00

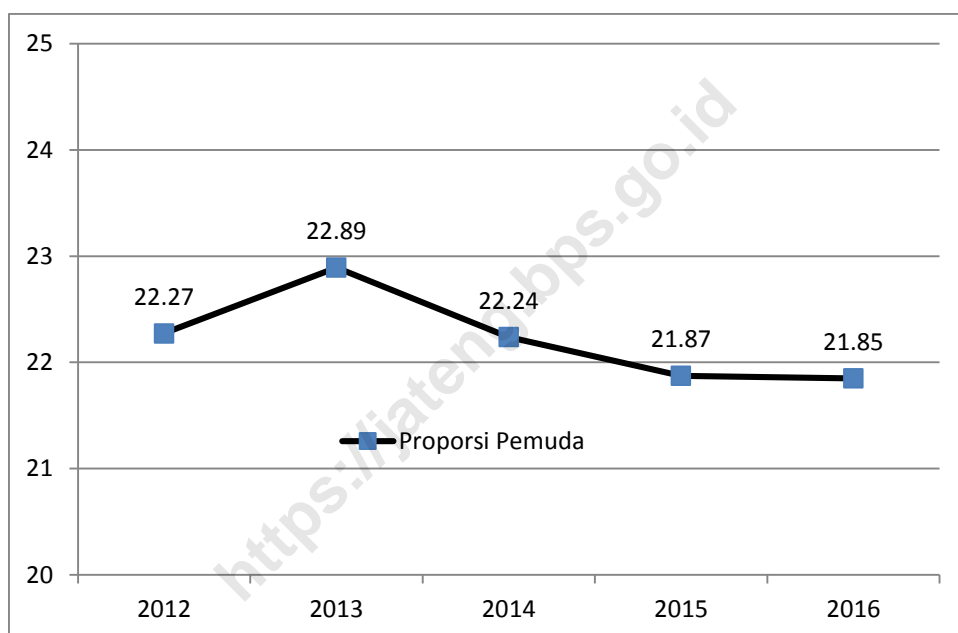
Sumber: BPS, Susenas 2016

Dilihat dari tempat tinggalnya, jumlah pemuda di daerah perkotaan sekitar 3,64 juta jiwa atau 22,81 persen sementara itu di daerah perdesaan sekitar 3,78 juta jiwa atau 21,00 persen. Secara jumlah, pemuda di perkotaan lebih kecil dibandingkan

pemuda perdesaan, akan tetapi secara persentase pemuda di perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pemuda terhadap penduduk Jawa Tengah tahun 2016 mengalami penurunan. Perkembangan persentase pemuda dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Persentase Pemuda Jawa Tengah, 2012-2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Persentase pemuda di Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung mengalami penurunan meskipun penurunannya relatif sedikit. Pada tahun 2012 persentase pemuda Jawa Tengah tercatat 22,27 persen, mengalami kenaikan menjadi 22,89 persen pada tahun 2013 dan turun kembali pada tahun 2014 menjadi 22,24 persen dan pada tahun 2015 menjadi 21,87 persen hingga tahun 2016 menjadi 21,85 persen. Perubahan persentase pemuda di suatu wilayah dipengaruhi oleh banyaknya pemuda yang melakukan migrasi masuk dan keluar wilayah serta pengaruh tingkat kelahiran pada kohort sebelum dan sesudahnya.

3.2 Pemuda menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.2 menunjukkan rasio jenis kelamin menurut tipe daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Rasio jenis kelamin tahun 2016 adalah 102,80 yang berarti bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat sekitar 102 orang laki-laki. Terdapat perbedaan antara rasio jenis kelamin di perkotaan dan perdesaan, yang mana rasio jenis kelamin pemuda di perdesaan lebih tinggi dibanding rasio jenis kelamin di perkotaan, hal ini juga dapat diartikan bahwa proporsi penduduk laki-laki di perdesaan lebih tinggi dibandingkan proporsi penduduk laki-laki di perkotaan. Pada tahun 2015 kondisi ini terjadi sebaliknya, yaitu rasio jenis kelamin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan rasio jenis kelamin di perdesaan.

Tabel 3.2
Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Tipe Daerah,
2014-2016

Tipe Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	99,55	101,99	102,03
Perdesaan	101,19	99,63	103,54
Perkotaan + Perdesaan	100,39	100,77	102,80

Sumber: BPS, Susenas 2016

3.3 Pemuda menurut Kelompok Umur

Kelompok umur pemuda dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur, yaitu kelompok umur 16-20 tahun, kelompok umur 21-25 tahun dan kelompok umur 26-30 tahun. Pada tabel 3.3 terlihat bahwa struktur pemuda antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak terdapat perbedaan. Persentase pemuda pada kelompok umur 16-20 tahun adalah 33,87 persen, pada kelompok umur 21-25 tahun sebesar 33,68 persen

dan yang paling sedikit adalah pada kelompok umur 26-30 tahun, yaitu sebanyak 32,45 persen.

Tabel 3.3
Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2016

Kelompok Umur	Tipe Daerah		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
16-20	34,49	33,28	33,87
21-25	33,60	33,75	33,68
26-30	31,91	32,97	32,45
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

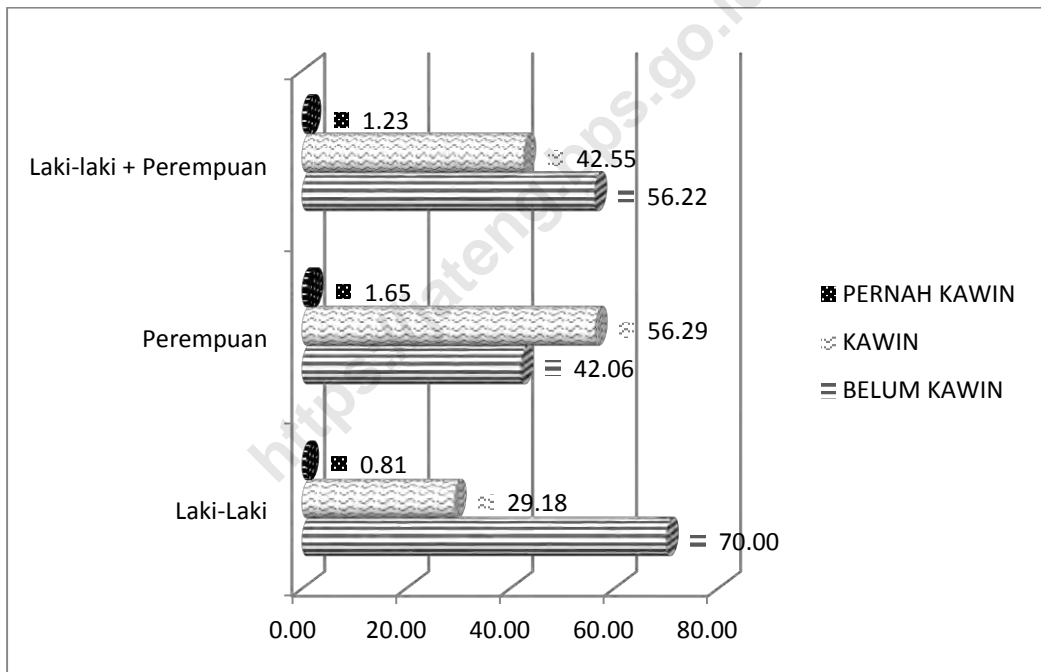
3.4 Pemuda menurut Status Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 menyatakan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pada Gambar 3.2 memperlihatkan persentase pemuda menurut jenis kelamin dan status perkawinannya, status perkawinan dikelompokkan menjadi tiga yaitu belum kawin, kawin dan pernah kawin. Status perkawinan pernah kawin meliputi mereka yang telah cerai hidup dan cerai mati. Persentase terbesar adalah pemuda yang berstatus belum kawin, yaitu 56,22 persen. Pemuda yang berstatus kawin sebanyak 42,55 persen dan yang berstatus pernah kawin adalah 1,23 persen. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, persentase pemuda laki-laki yang belum kawin lebih besar

dibandingkan pemuda perempuan, yaitu 70,00 persen berbanding 42,06 persen. Persentase pemuda laki-laki yang berstatus kawin adalah 29,18 persen, lebih rendah dibanding pemuda perempuan (56,29 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemuda laki-laki mempunyai kecenderungan untuk menunda usia perkawinan. Tanggung jawab memberikan nafkah bagi laki-laki merupakan salah satu faktor penentu pemuda laki-laki untuk menunda pernikahannya dan memilih mempersiapkannya lebih matang untuk menikah.

Gambar 3.2
Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2016

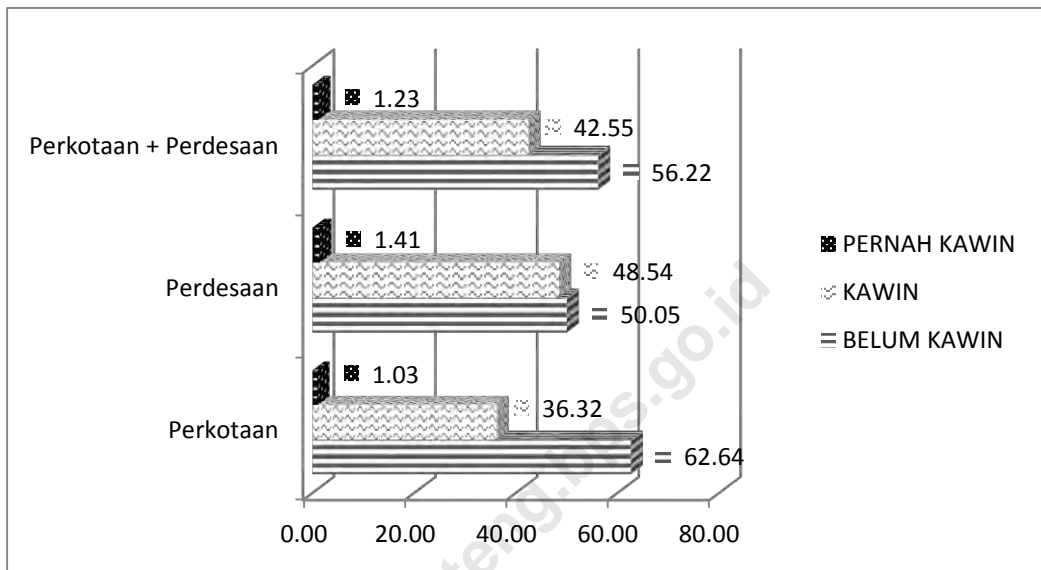


Sumber: BPS, Susenas 2016

Gambar 3.3 menunjukkan persentase pemuda menurut tipe daerah dan status perkawinan. Pemuda di perkotaan cenderung lebih menunda pernikahannya dibanding pemuda perdesaan. Ini terlihat dari persentase pemuda perkotaan yang berstatus belum kawin lebih besar (62,64 persen) dibanding pemuda perdesaan yang berstatus belum kawin (50,05 persen). Kondisi wilayah dan jenis lapangan usaha di perkotaan

yang menuntut pemuda untuk berkarir diduga merupakan salah satu penyebab tertundanya pernikahan pemuda di perkotaan.

Gambar 3.3
Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Status Perkawinan, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.4 menunjukkan proporsi pemuda yang pernah kawin menurut kelompok umur, tipe daerah, dan jenis kelamin. Proporsi pemuda pernah kawin terbanyak adalah pada kelompok umur 26-30 tahun, yaitu 78,08 persen atau tujuh kali lebih besar dibanding proporsi pemuda pernah kawin umur 16-20 tahun, sementara proporsi pemuda pernah kawin umur 21-25 tahun adalah 44,82 persen atau hampir lima kali lipat proporsi pemuda pernah kawin umur 16-20 tahun.

Proporsi pemuda laki-laki yang pernah kawin adalah 30,00 persen, lebih rendah dibanding proporsi pemuda perempuan pernah kawin (57,94 persen). Pada setiap kelompok umur proporsi pemuda perempuan yang pernah kawin lebih tinggi dibanding proporsi pemuda laki-laki yang pernah kawin. Dilihat dari tempat tinggal, proporsi pemuda di perdesaan yang pernah kawin lebih tinggi dibanding pemuda perkotaan yang pernah kawin untuk semua kelompok umur.

Tabel 3.4
Proporsi Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah,
dan Jenis Kelamin, 2016

Kelompok Umur	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16-20	1,50	10,87	6,03	2,23	26,44	13,70	1,87	18,58	9,88
21-25	18,84	51,57	35,53	31,73	75,46	53,71	25,47	63,69	44,82
26-30	59,75	87,02	73,13	69,59	95,94	82,69	64,82	91,67	78,08
Total	25,90	49,05	37,36	33,91	66,56	49,95	30,00	57,94	43,78

Sumber: BPS, Susenas 2016

3.5 Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga

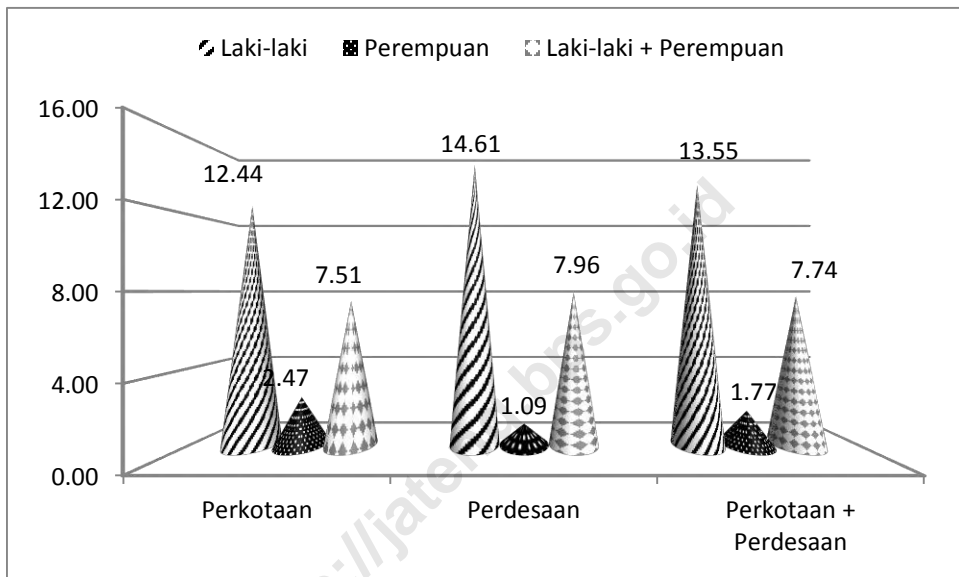
Kepala rumah tangga merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Kepala rumah tangga mempunyai kedudukan penting dalam kelangsungan dan keberadaan rumah tangga karena selain bertanggung jawab dari sisi ekonomi juga bertanggungjawab untuk mengatur anggota rumah tangganya serta bertanggung jawab terhadap segala pengambilan keputusan.

Gambar 3.4 menunjukkan proporsi pemuda kepala rumah tangga menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Pemuda yang merupakan kepala rumah tangga sebanyak 7,74 persen. Dilihat dari jenis kelaminnya, proporsi pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga jauh lebih besar dibanding pemuda perempuan, yaitu 13,55 persen berbanding 1,77 persen atau sekitar 7 kali lipatnya.

Jika dilihat dari tipe daerah, proporsi pemuda yang menjadi kepala rumah tangga di perkotaan relatif lebih kecil dibanding pemuda di perdesaan, yaitu 7,51 persen untuk perkotaan dan 7,96 persen untuk perdesaan. Proporsi pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga di perkotaan adalah 12,44 persen atau lebih kecil dibandingkan di perdesaan yang sebesar 14,61 persen. Sementara itu proporsi pemuda

perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di perkotaan adalah 2,47 persen, lebih besar dibandingkan di perdesaan yang hanya 1,09 persen.

Gambar 3.4
Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016



PENDIDIKAN

<https://inteng.bps.go.id>



Pendidikan

Pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Goals keempat dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua. Kualitas sumber daya manusia akan meningkat jika sumber daya manusia mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap penduduk. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan peningkatan mutu dan jumlah fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Gambaran mengenai pendidikan pemuda Jawa Tengah akan dibahas

pada bagian ini. Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan diantaranya adalah partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah dan akses pemuda terhadap internet.

4.1 Partisipasi Sekolah

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap pemuda dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah. Persentase partisipasi sekolah pemuda di Jawa Tengah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.1. Masih ada sebanyak 0,57 persen pemuda yang belum mengenyam pendidikan. Dilihat dari jenis kelamin, pemuda laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah adalah sebesar 0,62 persen, sedangkan pemuda perempuan hanya 0,52 persen.

Tabel 4.1
Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, 2016

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,62	0,52	0,57
Masih Bersekolah	23,21	23,61	23,41
Tidak Bersekolah Lagi	76,17	75,87	76,02

Sumber: BPS, Susenas 2016

Sebagian besar pemuda sudah tidak bersekolah lagi, yaitu sebesar 76,02 persen. Pemuda laki-laki yang sudah tidak bersekolah lagi sebanyak 76,17 persen, sedikit lebih

tinggi dibanding pemuda perempuan yang sebanyak 75,87 persen. Kondisi ini dapat diartikan bahwa tidak ada kesenjangan gender dalam hal partisipasi sekolah pemuda.

Tabel 4.2 menunjukkan persentase pemuda menurut partisipasi sekolah dan tipe daerah. Pemuda yang tidak/belum pernah sekolah di perkotaan adalah 0,58 persensedikit lebih tinggi dibanding pemuda di perdesaan yang hanya 0,56 persen. Sementara itu pemuda dengan status masih bersekolah di perkotaan lebih tinggi (28,34 persen) dibandingkan di perdesaan (18,66 persen).

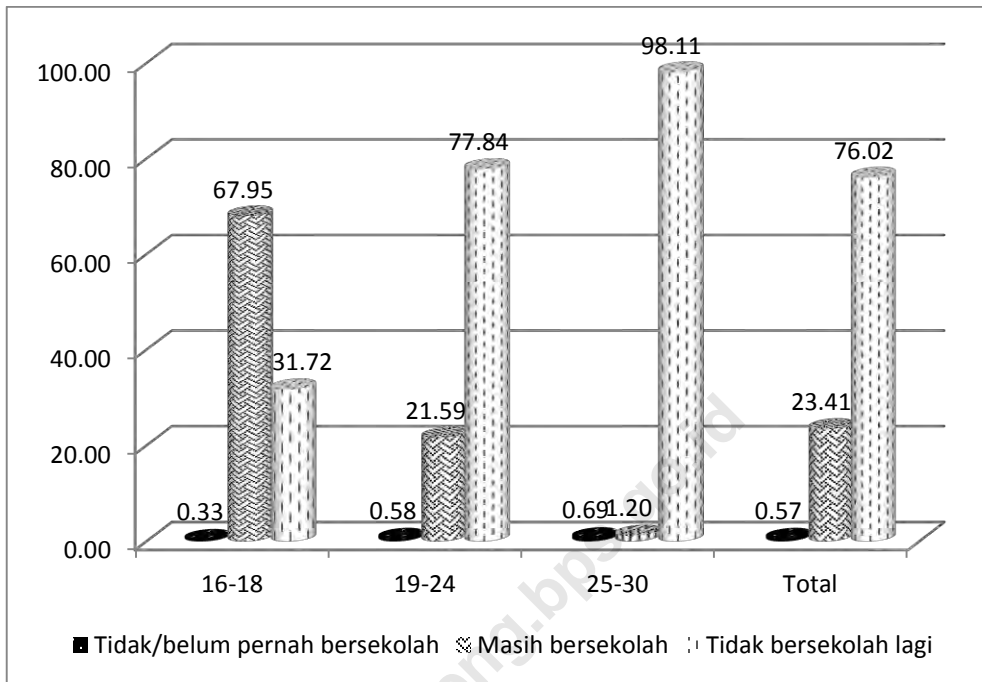
Tabel 4.2
Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Tipe Daerah, 2016

Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,58	0,56	0,57
Masih Bersekolah	28,34	18,66	23,41
Tidak Bersekolah Lagi	71,08	80,78	76,02

Sumber: BPS, Susenas 2016

Perbedaan partisipasi sekolah pemuda antara perkotaan dan perdesaan dimungkinkan karena kesenjangan dalam mengakses pendidikan. Salah satu yang menjadi penyebab kesenjangan tersebut adalah adanya perbedaan dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan dan faktor pendukung antara perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat di perdesaan akan pentingnya pendidikan juga menyebabkan tingkat pendidikan di daerah perdesaan relatif lebih tertinggal dibanding dengan perkotaan. Pada umumnya, orang tua di daerah perdesaan lebih memilih mengajak anak-anak mereka berkebun atau bertani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi daripada memberi kesempatan pada anak-anaknya untuk bersekolah.

Gambar 4.1
Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Persentase pemuda menurut partisipasi sekolah dan kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 4.1. Persentase pemuda yang masih bersekolah terbesar adalah pada umur 16-18 tahun, yaitu 67,95 persen, sementara pemuda umur 19-24 tahun yang masih sekolah adalah 21,59 persen. Pada dasarnya usia 16-18 tahun merupakan usia sekolah pada Sekolah Menengah sedangkan usia 19-24 tahun adalah usia dimana pemuda melanjutkan sekolah pada Perguruan Tinggi.

Indikator yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS pemuda didefinisikan sebagai persentase pemuda yang masih sekolah terhadap jumlah pemuda secara keseluruhan tanpa memperhatikan jenjang atau tingkat pendidikan yang sedang dijalannya. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Kelompok Umur,
Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16-18	Laki-laki	74,54	61,92	68,09
	Perempuan	76,07	59,34	67,80
	Total	75,29	60,70	67,95
19-24	Laki-laki	26,45	13,54	19,88
	Perempuan	31,14	15,47	23,31
	Total	28,81	14,49	21,59
25-30	Laki-laki	2,44	0,79	1,59
	Perempuan	0,87	0,74	0,80
	Total	1,67	0,76	1,20

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.3 memperlihatkan angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur, jenis kelamin dan tipe daerah. Secara umum APS pemuda menurun seiring dengan peningkatan umur pemuda. Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS pemuda sebesar 67,95 persen sementara pada kelompok umur 19-24 tahun APS sebesar 21,59 persen dan pada kelompok umur 25-30 tahun APS pemuda hanya 1,20 persen. Telah terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan dan kebutuhan untuk mencari nafkah diduga merupakan faktor penyebab rendahnya partisipasi sekolah pada kelompok umur 25-30 tahun.

APS pemuda kelompok umur 16–18 tahun di perkotaan sebesar 75,29 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 60,70 persen. Pada kelompok umur di atasnya (19–24 tahun), APS pemuda di perkotaan sebesar 28,81 persen dan di perdesaan sebesar 14,49 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 25–30 tahun APS di perkotaan sebesar 1,67 persen dan di perdesaan sebesar 0,76 persen.

4.2 Angka Buta Huruf

Program pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia ada tiga hal, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Buta aksara fungsional adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun.

Masih adanya penduduk yang buta aksara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih ada siswa usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah dasar. Kemudian ada juga penduduk yang sejak awal memang tidak sekolah karena berbagai alasan, seperti keadaan ekonomi keluarga dan kondisi geografis. Ada juga penduduk yang pernah mengikuti program pemberantasan buta aksara, namun penduduk itu kembali menjadi buta aksara karena kurang intensif memelihara kemampuan keaksaraannya.

Tabel 4.4
Angka Buta Huruf Pemuda menurut Tipe Daerah dan
Jenis Kelamin, 2015-2016

Tipe Daerah	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	0,07	0,08	0,07	0,07	0,05	0,06
Perdesaan	0,15	0,11	0,13	0,19	0,12	0,16
Total	0,11	0,09	0,10	0,13	0,08	0,11

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.4 memperlihatkan angka buta huruf pemuda menurut tipe daerah dan jenis kelamin tahun 2015 dan 2016. Angka buta huruf pemuda Jawa Tengah tahun 2015 adalah 0,10 persen dan tahun 2016 sebesar 0,11 persen. Angka buta huruf pemuda di

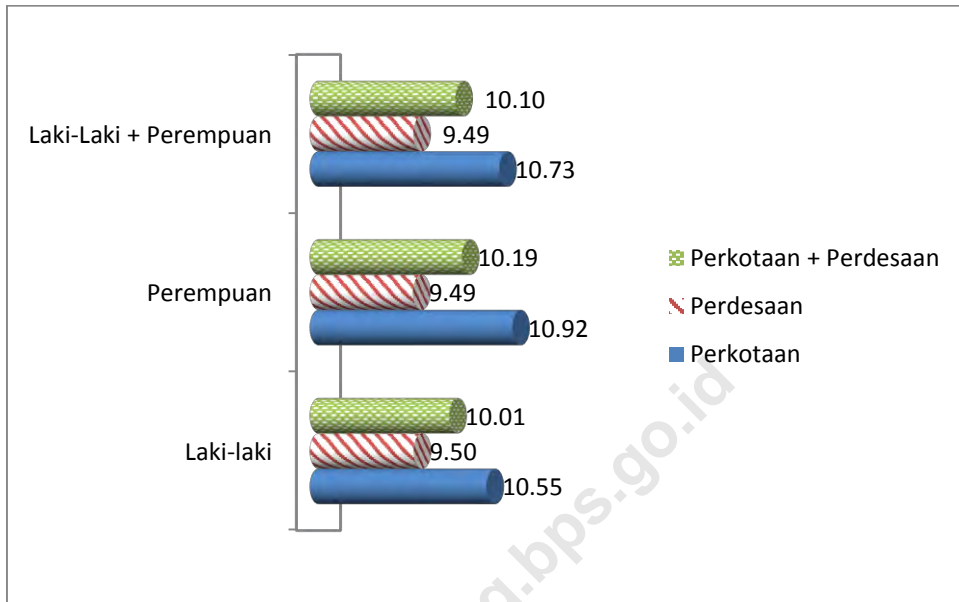
perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Angka buta huruf pemuda di perkotaan pada tahun 2015 adalah 0,07 sedangkan angka buta huruf di perdesaan sebesar 0,13 persen. Sementara itu pada tahun 2016 angka buta huruf di perkotaan adalah 0,06 persen, sedangkan angka buta huruf di perdesaan 0,16 persen. Lebih tingginya angka buta huruf di perdesaan dimungkinkan karena perbedaan kemudahan akses ke fasilitas pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat perdesaan.

4.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang sudah dilalui oleh seseorang di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti tanpa memperhatikan apakah seseorang tersebut tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah digunakan sebagai indikator rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti jenjang pendidikan yang dijalani semakin tinggi. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun bagi penduduknya, artinya bahwa setiap penduduk Indonesia harus tuntas belajar hingga tamat SMP.

Pada Gambar 4.2 disajikan data rata-rata lama sekolah pemuda menurut jenis kelamin dan tipe daerah, berdasarkan hasil Susenas 2016 rata-rata lama sekolah yang berhasil dicapai pemuda Jawa Tengah adalah 10,10 tahun, yang berarti bahwa pemuda Jawa Tengah rata-rata mampu menyelesaikan sekolah sampai kelas sebelas Sekolah Menengah Umum. Dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah antar tipe daerah menunjukkan bahwa pemuda di daerah perkotaan mempunyai rata-rata lama sekolah lebih tinggi (10,73 tahun) dibanding pemuda di daerah perdesaan (9,49 tahun). Dilihat secara gender, capaian rata-rata lama sekolah pemuda perempuan sedikit lebih lama (10,19 tahun) dibanding pemuda laki-laki (10,01 tahun).

Gambar 4.2
Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda menurut Jenis Kelamin dan
Tipe Daerah, 2016

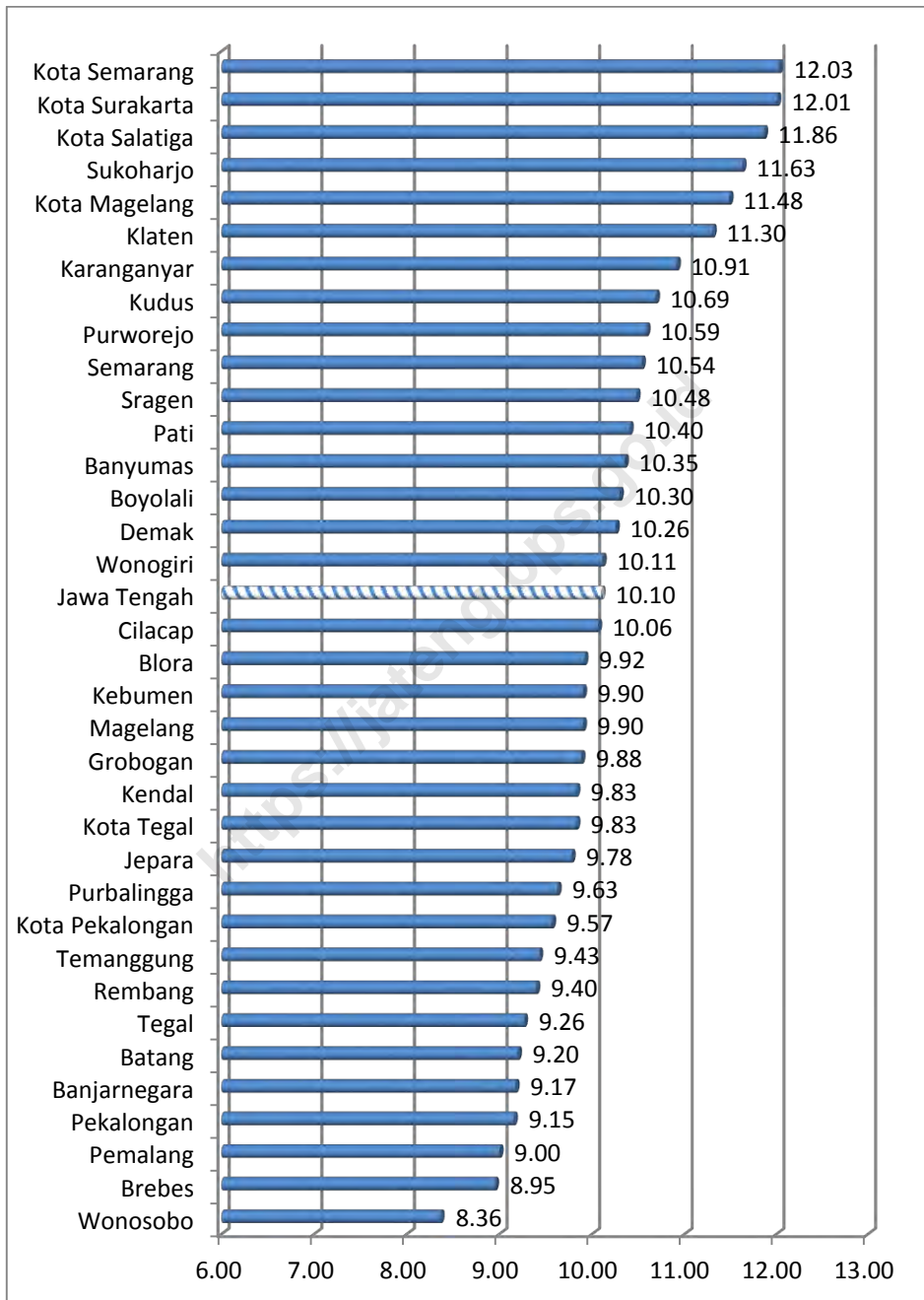


Sumber: BPS, Susenas 2016

Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata lama sekolah pemuda pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari Gambar tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan capaian rata-rata lama sekolah pemuda antar daerah di Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan wilayah dengan capaian rata-rata lama sekolah pemudanya paling tinggi, yaitu 12,03 tahun, yang berarti bahwa pemuda di Kota Semarang rata-rata telah lulus Sekolah Menengah Atas. Rata-rata lama sekolah pemuda paling rendah adalah di Kabupaten Wonosobo, yaitu 8,36 tahun yang berarti bahwa pemuda di Kabupaten Wonosobo rata-rata telah menyelesaikan kelas 8 pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antar daerah dimungkinkan karena perbedaan kemudahan akses ke fasilitas pendidikan formal, perbedaan kondisi geografis wilayah dan kondisi ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap akses pendidikan. Empat wilayah dengan rata-rata lama sekolah pemuda tertinggi adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 4.3
Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda menurut Kabupaten/Kota, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

4.4 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia. Sehingga pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah dapat dilihat melalui data-data tersebut. Selain itu, data mengenai tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 4.5
Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat ke Atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	0,73	2,34	14,79	35,25	46,89	100,00
Perempuan	0,43	0,90	12,96	36,74	48,98	100,00
Total	0,58	1,63	13,88	35,99	47,92	100,00
Perdesaan						
Laki-laki	0,52	3,55	24,12	37,67	34,14	100,00
Perempuan	0,60	1,64	23,73	45,35	28,68	100,00
Total	0,56	2,61	23,93	41,45	31,45	100,00
Total						
Laki-laki	0,62	2,96	19,57	36,49	40,37	100,00
Perempuan	0,52	1,27	18,43	41,12	38,67	100,00
Total	0,57	2,13	19,01	38,77	39,53	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.5 memberikan gambaran tingkat pendidikan pemuda Jawa Tengah menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Persentase terbesar pemuda telah menamatkan pendidikan SM atau sederajat, yaitu 39,53 persen. Pemuda yang tamat SMP atau sederajat sebanyak 38,77 persen dan sebesar 19,01 persen yang menamatkan sekolah sampai Sekolah Dasar.

Dilihat dari tipe daerah, secara umum persentase pemuda kota yang mempunyai pendidikan tinggi lebih besar dibanding pemuda perdesaan. Pemuda yang tamat SMA ke atas di perkotaan sebanyak 47,92 persen sementara di perdesaan hanya 31,45 persen. Sementara pemuda yang tidak memiliki ijazah di perkotaan hanya 2,21 persen sedangkan di perdesaan sebesar 3,17 persen.

4.5 Akses Internet

Teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan teknologi yang memiliki perkembangan cukup pesat saat ini, sehingga menghadirkan beragam pilihan bentuk teknologi dan kecanggihannya. Salah satunya adalah Internet (*interconnection networking*), yang merupakan bukti nyata dari pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Internet membawa pengaruh yang sangat besar dalam pola kehidupan masyarakat dunia. Internet disebut juga dunia tanpa batas karena sifatnya yang benar-benar mendunia. Waktu dan jarak bukan lagi masalah untuk memperoleh informasi maupun memberi informasi.

Teknologi internet hadir sebagai media multifungsi. Internet sebagai media pendidikan mampu menghadirkan karakteristik sebagai media interpersonal (*e-mail*) dan massa (misal: *mailing list*), bersifat interaktif (misal: *chatting*) dan memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron. Karakteristik ini memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara lebih luas dibandingkan dengan media konvensional. Bagi yang masih bersekolah, teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai media pencari literatur/referensi guna menunjang kegiatan belajarnya.

Tabel 4.6
Proporsi Pemuda yang Menggunakan Internet menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2016

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	20,13	86,69	57,84	65,53
Perempuan	12,45	88,89	50,65	61,62
Total	17,33	87,81	54,31	63,59
Perdesaan				
Laki-laki	0,00	76,41	44,34	50,21
Perempuan	4,36	84,21	31,45	40,93
Total	2,31	80,17	37,98	45,65
Total				
Laki-laki	11,51	82,38	50,55	57,69
Perempuan	7,64	87,05	40,22	51,11
Total	9,78	84,70	45,47	54,45

Sumber: BPS, Susenas 2016

Data Susenas 2016 memperlihatkan sebanyak 54,45 persen pemuda di Jawa Tengah pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Jika dilihat dari status sekolahnya, memperlihatkan bahwa sebanyak 84,70 persen pemuda yang masih sekolah pernah mengakses internet, sementara itu pemuda yang tidak sekolah lagi mengakses internet sebanyak 45,47 persen. Pemuda yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 9,78 persen mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Ada

kecenderungan bahwa pemuda yang masih sekolah cenderung mengakses internet dibandingkan pemuda yang sudah tidak bersekolah.

Terdapat perbedaan mencolok antara proporsi pemuda di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses internet, sebanyak 63,59 persen pemuda di perkotaan pernah mengakses internet sementara pemuda di perdesaan yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir ada 45,65 persen.

Jika dilihat dari jenis kelamin, terdapat sedikit perbedaan proporsi pemuda yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, pemuda laki-laki (57,69 persen) sedikit lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan (51,11 persen).

<https://jateng.bps.go.id>



KESEHATAN

<https://www.tengapops.go.id>



Kesehatan

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan tetapi juga mendorong peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, namun juga dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari pelbagai sektor. Salah satu misi untuk mencapai visi pembangunan kesehatan 2015, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup

dalam lingkungan dan dengan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Kesehatan merupakan modal utama yang sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa. Betapa sulitnya melaksanakan berbagai program pembangunan jika para pelaksana teknisnya tidak dalam kondisi sehat. Kesehatan meliputi dua komponen penting, yaitu kesehatan psikis (jiwa) dan kesehatan fisik (raga). Kedua komponen kesehatan ini hendaknya harus diperhatikan sejak usia muda. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan mengisi jiwa generasi muda dengan nilai-nilai agama dan pendidikan moral. Sementara untuk menjaga kesehatan raga dengan cara memberi asupan nutrisi yang baik agar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang kuat dan sehat.

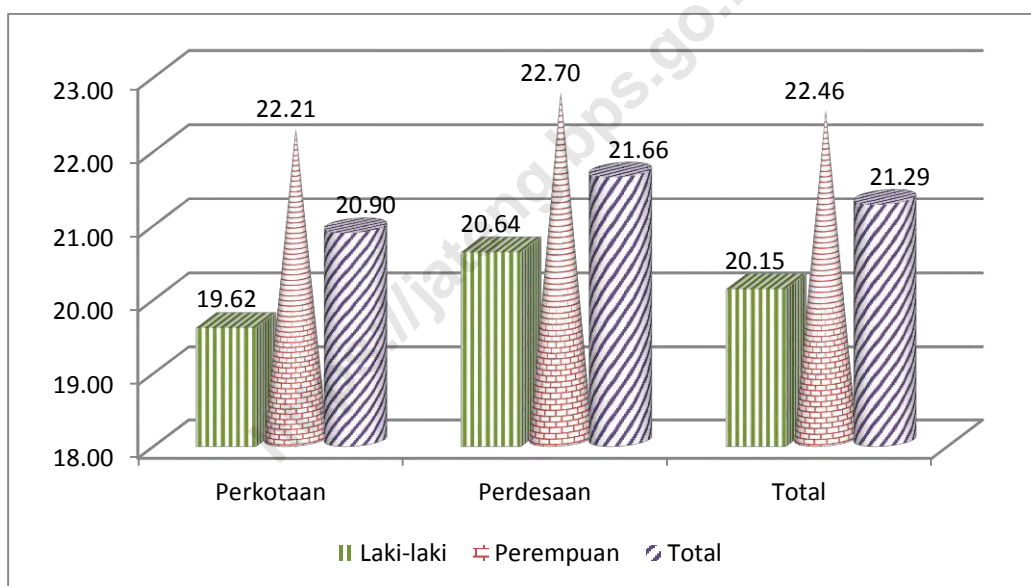
Peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional sangat diperlukan, terutama pemuda sebagai elemen intelektual yang memiliki peran strategis sebagai penerus pembangunan bangsa Indonesia. Para pemuda hendaknya selalu diajak dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa ini dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan pemuda dalam rangka menciptakan sumber daya pemuda yang handal dan terampil. Peran yang dapat dilakukan generasi muda Indonesia dalam rangka menyukseskan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah dengan turut berpartisipasi dan ikut berpola hidup sehat.

Pada bab ini akan dibahas beberapa indikator kesehatan seperti keluhan kesehatan, angka kesakitan (*morbidity rate*), rata-rata lama sakit, dan cara berobat dalam rangka memperoleh gambaran rinci mengenai derajat kesehatan pemuda. Selain itu dibahas pula partisipasi pemuda perempuan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).

5.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau hal lain. Secara umum, jumlah kejadian keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada dasarnya merupakan salah satu indikasi pola perilaku tidak sehat penduduk, antara lain adalah faktor kekurangpedulian dalam menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, dan faktor keengganan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Gambar 5.1
Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

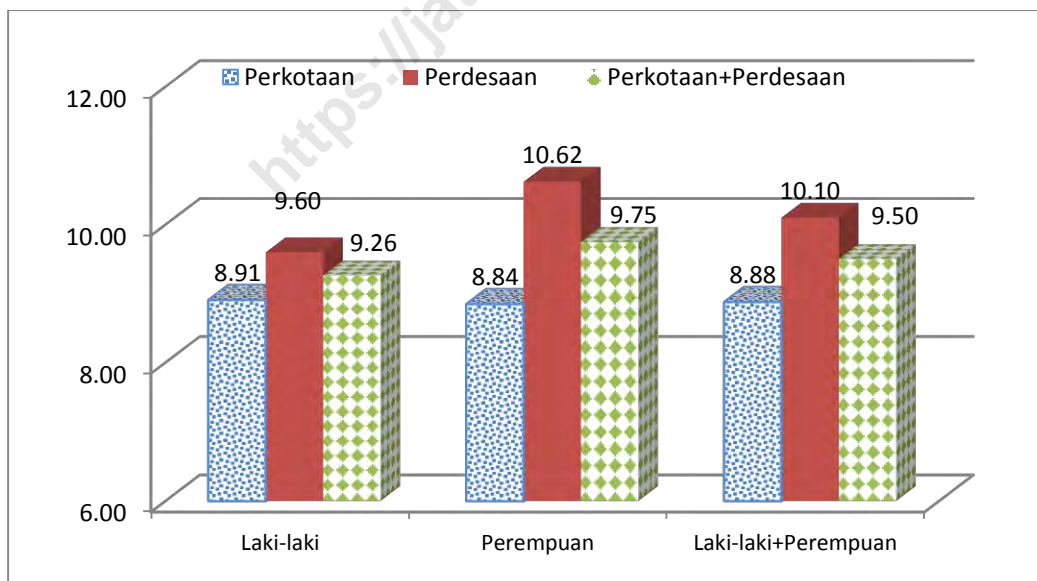
Proporsi pemuda Jawa Tengah yang mengalami keluhan kesehatan sebulan terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.1. Sebanyak 21,29 persen pemuda di Jawa Tengah mengalami keluhan kesehatan. Proporsi pemuda laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan lebih kecil dibandingkan pemuda perempuan, yaitu 20,15 persen berbanding 22,46 persen, pola yang sama terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, proporsi pemuda di perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan sedikit lebih banyak dibanding pemuda di perkotaan,

yaitu 21,66 persen berbanding 20,90 persen. Faktor perbedaan lingkungan antara perdesaan dan perkotaan diduga mempunyai pengaruh terhadap status kesehatan pemuda.

5.2 Angka Kesakitan

Penurunan kondisi kesehatan atau daya tahan tubuh yang dialami oleh seseorang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi mengganggu produktivitas kerja dan akhirnya mengganggu kinerja secara keseluruhan. Apabila kondisi tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat dikategorikan sakit. Angka kesakitan (*morbidity rate*) pemuda adalah proporsi pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Gambar 5.2
Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Semakin tinggi proporsi pemuda yang sakit terhadap populasi pemuda, menunjukkan derajat kesehatan pemuda yang semakin buruk. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013–2018, salah satu program pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah menurunkan angka kesakitan.

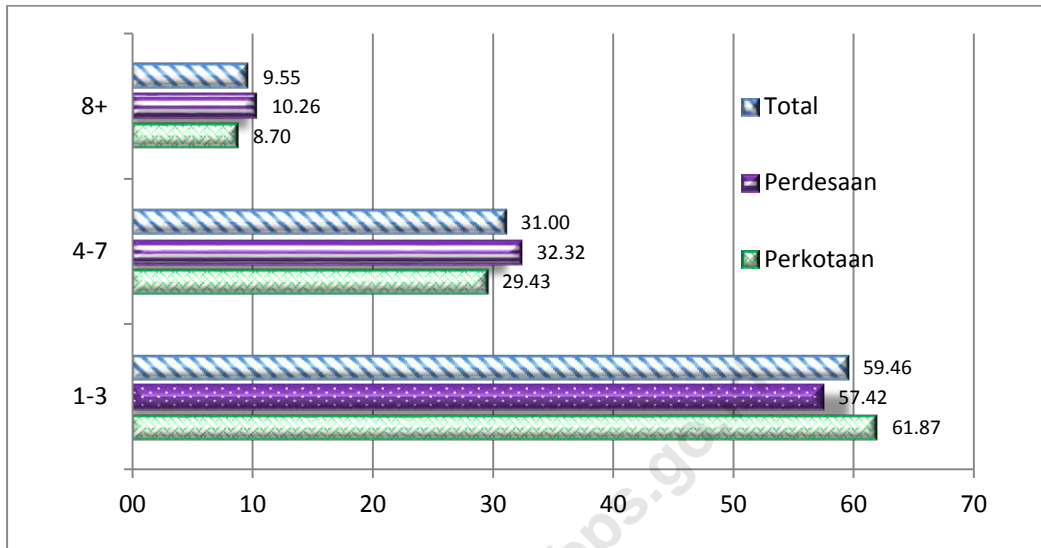
Angka kesakitan pemuda di Jawa Tengah tahun 2016 adalah 9,50 persen, dilihat dari jenis kelamin, angka kesakitan pemuda perempuan cenderung lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki, yaitu 9,75 persen berbanding 9,26 persen. Sementara itu jika dilihat dari daerah tempat tinggal, angka kesakitan pemuda di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dibandingkan pemuda di daerah perkotaan, yaitu 10,10 persen berbanding 8,88 persen. Angka kesakitan tertinggi adalah pada perempuan di perdesaan, yaitu 10,62 persen.

5.3 Lama Sakit

Rata-rata lama sakit dapat memberikan gambaran tingkat keparahan sakit yang diderita oleh seseorang. Gambar 5.3 memperlihatkan rata-rata lama sakit pemuda menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Sebagian besar pemuda yang mengalami gangguan kesehatan, lama sakitnya antara 1-3 hari, yaitu 59,46 persen. Sebesar 31,00 persen pemuda lama sakitnya antara 4 sampai dengan 7 hari.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, persentase pemuda dengan durasi sakit 1-3 hari lebih tinggi di perkotaan, yaitu 61,87 persen di perkotaan dan 57,42 persen di perdesaan. Sebaliknya, pada durasi sakit antara 4-7 hari persentase pemuda di perkotaan (29,43 persen) justru lebih rendah dibanding perdesaan (32,32 persen). Baik di perkotaan maupun perdesaan masih terdapat pemuda dengan durasi sakit lebih dari 8 hari, yaitu 8,70 persen di perkotaan dan 10,26 persen di perdesaan. Ini mengindikasikan bahwa secara umum durasi sakit di perkotaan cenderung lebih singkat dibanding perdesaan.

Gambar 5.3
Persentase Pemuda yang mengalami gangguan Kesehatan menurut Lama Sakit dan Tipe Daerah, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

5.4 Cara Berobat

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengobati penyakit yang diderita, diantaranya adalah dengan berobat ke tempat pelayanan kesehatan, mendatangkan petugas kesehatan ke rumah, ataupun dengan mencoba mengobati sendiri. Tindakan paling awal yang dilakukan ketika merasakan sakit adalah dengan berusaha mengobati sendiri untuk menghilangkan rasa sakit sebelum akhirnya berobat ke tenaga medis maupun non medis.

Tabel 5.1 menunjukkan persentase pemuda yang tidak berobat jalan menurut alasan utama tidak berobat jalan, tipe daerah dan jenis kelamin. Sebagian besar pemuda yang tidak berobat jalan dikarenakan telah mengobati sendiri, yaitu 64,71 persen. Lebih dominannya pemuda yang mengobati sendiri sakitnya dan tidak berobat jalan dimungkinkan karena dengan mengobati sendiri sebagian besar dari mereka telah dapat mengatasi keluhannya.

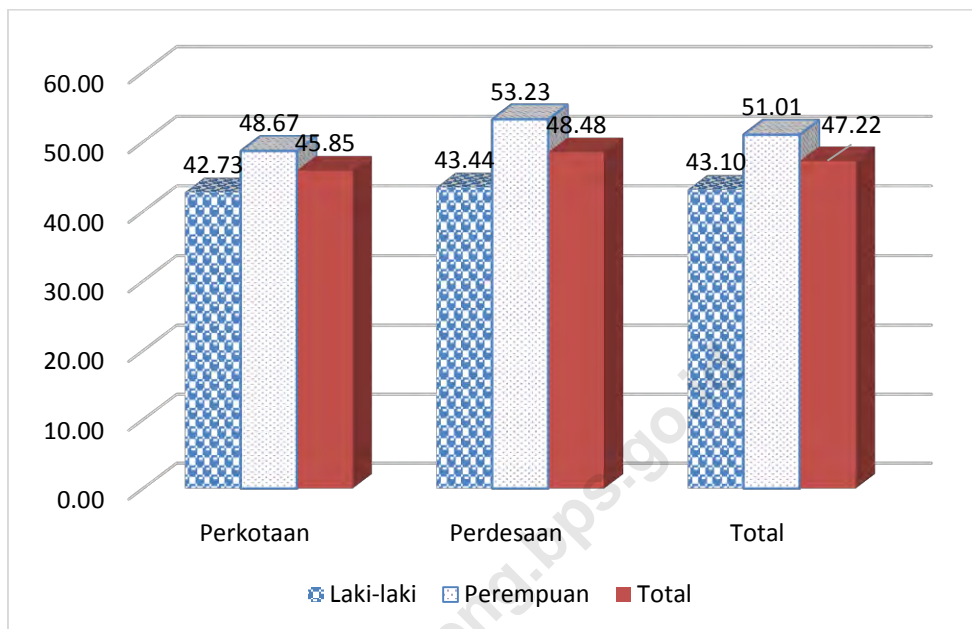
Tabel 5.1
Persentase Pemuda yang Tidak Berobat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Berobat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Punya Biaya Berobat	1,14	0,92	1,05	1,01	1,03
Tidak Ada Biaya Transport	0,39	0,29	0,35	0,33	0,34
Tidak Ada Sarana Transportasi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	0,17	0,13	0,16	0,13	0,15
Mengobati Sendiri	67,27	62,38	64,76	64,66	64,71
Tidak Ada Yang Mendampingi	0,19	0,54	0,25	0,50	0,37
Merasa Tidak Perlu	28,25	32,72	30,76	30,44	30,59
Lainnya	2,58	3,00	2,66	2,93	2,80
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Persentase kedua terbesar alasan tidak berobat jalan adalah karena merasa tidak perlu, yaitu 30,59 persen, dan sisanya dikarenakan tidak punya biaya berobat jalan sebesar 1,03 persen, tidak ada biaya transport sebesar 0,34 persen, tidak ada yang mendampingi dan lain-lain. Pola ini terjadi baik di perdesaan maupun perkotaan, laki-laki maupun perempuan.

Gambar 5.4
Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Proporsi pemuda sakit yang berobat jalan menurut tipe daerah dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5.4. Sebanyak 47,22 persen pemuda mengobati sakitnya dengan berobat jalan, pemuda perempuan yang berobat jalan lebih banyak (51,01 persen) dibandingkan pemuda laki-laki yang berobat jalan (43,10 persen). Jika dibandingkan menurut tipe daerah, proporsi pemuda di perkotaan cenderung lebih sedikit (45,85 persen) dibandingkan pemuda di perdesaan (48,48 persen).

Dilihat dari tempat berobatnya, sebagian besar pemuda mempunyai kecenderungan berobat jalan ke praktik dokter/bidan, yaitu 50,32 persen. Selain di praktik dokter/bidan, tempat berobat jalan yang cenderung didatangi adalah Puskesmas dan klinik/praktik dokter bersama yaitu masing-masing 24,18 persen dan 11,87 persen (Tabel 5.2).

Tabel 5.2
Persentase Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Jalan,
Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Sakit Pemerintah	7,43	5,90	7,58	5,87	6,62
Rumah Sakit Swasta	7,25	4,93	6,45	5,66	6,01
Praktik Dokter/ Bidan	46,92	53,31	48,01	52,12	50,32
Klinik/ Praktik Dokter Bersama	15,46	8,72	11,96	11,80	11,87
Puskesmas/ Pustu	23,36	24,91	24,43	23,99	24,18
UKBM*)	0,45	1,77	1,14	1,17	1,16
Pengobatan Tradisional/ Alternatif	1,47	1,33	1,87	1,03	1,40
Lainnya	1,99	2,57	2,47	2,17	2,30
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

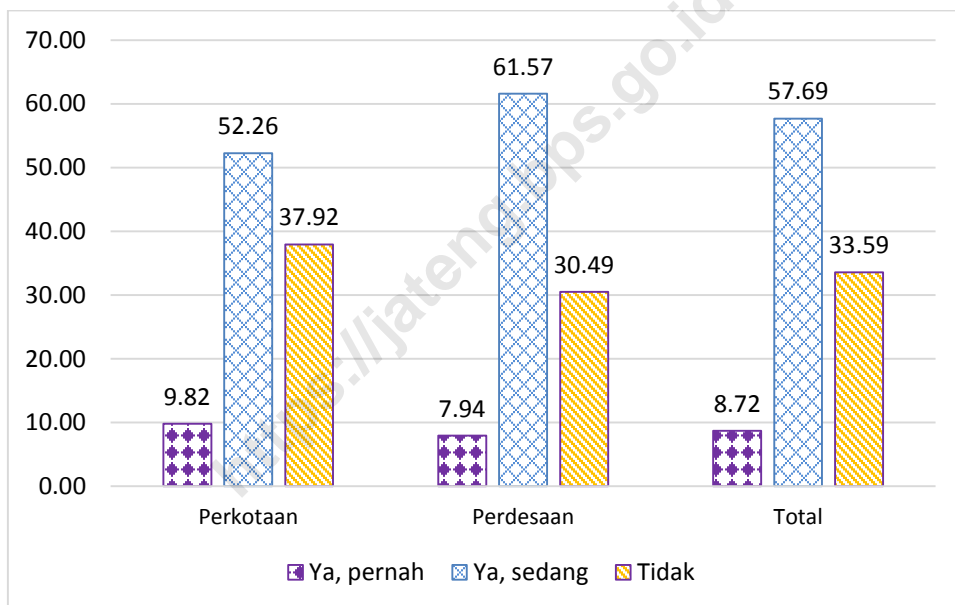
*) UKBM = Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Posyandu, dll)

5.5 Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Struktur umur pemuda termasuk usia produktif merupakan sasaran/target program KB yang bertujuan membatasi jumlah kelahiran. Sejalan dengan itu, partisipasi pemuda dalam kegiatan KB merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program tersebut.

Gambar 5.5 menunjukkan persentase pemuda perempuan menurut status penggunaan alat kontrasepsi. Pemuda perempuan merupakan sasaran yang tepat untuk pelaksanaan program keluarga berencana mengingat bahwa masa kesuburan wanita berada pada usia 15-49 tahun. Pemuda perempuan di Jawa Tengah yang sedang menggunakan alat kontrasepsi sebesar 57,69 persen, yang pernah menggunakan sebesar 8,72 persen dan 33,59 persen tidak pernah menggunakan.

Gambar 5.5
Persentase Pemuda Perempuan menurut Status Penggunaan Alat KB dan Tipe Daerah, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Jika dilihat dari tipe daerah, pemuda perempuan di perdesaan lebih banyak yang sedang menggunakan alat kontrasepsi dibanding pemuda perempuan di perkotaan, yaitu 61,57 persen berbanding 52,26 persen. Dan berlaku sebaliknya pada pemuda perempuan yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Lebih tingginya kecenderungan penggunaan alat kontrasepsi pada pemuda perempuan di perdesaan erat kaitannya dengan status kawin pemuda perempuan di perdesaan, yang mana

pemuda perempuan di pedesaan yang berstatus kawin persentasenya lebih besar dibanding pemuda perempuan di perkotaan (Gambar 3.3).

5.6 Umur Perkawinan Pertama Pemuda Perempuan

Perkawinan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan dan hal ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dalam hal ini fertilitas. Wirosuhardjo (1981:82) mengemukakan bahwa makin muda seseorang melakukan perkawinan makin panjang masa reproduksinya sehingga makin muda seseorang melangsungkan perkawinannya makin banyak pula kemungkinan anak yang dilahirkan. Tabel 5.3 menunjukkan persentase pemuda perempuan menurut tipe daerah dan umur kawin pertamanya.

Tabel 5.3
Persentase Pemuda Perempuan menurut Tipe Daerah dan
Umur Perkawinan Pertama, 2016

Tipe Daerah	Umur Perkawinan Pertama				
	<=15	16-18	19-21	22-24	25-30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	0,81	21,27	38,85	28,38	10,69
Perdesaan	2,79	36,12	38,09	16,92	6,08
Total	1,96	29,93	38,40	21,69	8,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Pada kelompok umur 19-21 tahun pemuda perempuan paling banyak melangsungkan perkawinan pertamanya, yaitu sebanyak 38,40 persen. Sementara itu pemuda perempuan yang melangsungkan perkawinan pertamanya pada umur 16-18 tahun sebesar 29,93 persen, yang menikah pada umur 22-24 tahun sebesar 21,69 persen dan masih ada yang menikah pada umur 15 tahun atau kurang, yaitu 1,96 persen.

Jika dibandingkan menurut tipe daerah, di daerah perdesaan pemuda perempuan mempunyai kecenderungan menikah pada usia lebih muda dibanding pemuda perkotaan. Pemuda perempuan yang menikah pada usia muda (kurang dari 19 tahun) di perdesaan adalah 38,91 persen, cenderung lebih banyak dibanding perkotaan yang sebesar 22,08 persen). Demikian sebaliknya pemuda perempuan yang menikah pada usia lebih matang (19 tahun ke atas) di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan.

Perbedaan kecenderungan usia kawin pertama antara perdesaan dan perkotaan diduga ada kaitannya dengan tingkat partisipasi sekolah antara perdesaan dan perkotaan. Hal ini terlihat dari lebih tingginya tingkat partisipasi sekolah pada setiap kelompok usia di perkotaan dibanding perdesaan (Tabel 4.3). Semakin lama seorang pemuda duduk di bangku sekolah maka ada kecenderungan semakin tertunda usia pernikahan pertama karena kewajiban pemuda untuk menyelesaikan sekolah terlebih dahulu.

Tabel 5.4
Persentase Pemuda Perempuan menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Umur Kawin Pertama, 2016

Pendidikan yang Ditamatkan	Umur Perkawinan Pertama					Total
	<=15	16-18	19-21	22-24	25-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ Sederajat	4,60	2,54	1,48	1,30	1,12	1,76
SMP/ Sederajat	60,92	38,93	25,92	18,27	13,90	27,44
SM/ Sederajat ke Atas	34,48	58,53	72,61	80,43	84,98	70,80
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Kaitan antara umur kawin pertama dengan pendidikan juga dapat terlihat dari Tabel 5.4. Tabel 5.4 menunjukkan persentase pemuda perempuan menurut pendidikan yang ditamatkan dan umur kawin pertama. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin

tinggi tingkat pendidikan semakin kecil persentase pemuda perempuan yang menikah pada usia muda. Pada tingkat pendidikan SMP ke bawah terlihat bahwa semakin tua umur perkawinan pertama semakin kecil persentase pemuda perempuan yang menikah. Pemuda perempuan yang menikah pada umur kurang dari 16 tahun sebanyak 65,52 persen, sementara itu yang menikah pada umur 16-18 tahun sebesar 41,47 persen, yang menikah pada umur 19-21 tahun sebesar 27,40 persen dan yang menikah pada umur 25 tahun ke atas hanya 15,02 persen.

Kondisi sebaliknya terjadi pada pemuda perempuan yang berpendidikan SMA ke atas. Pemuda perempuan yang menikah pada usia kurang dari 16 tahun hanya 34,48 persen, yang menikah pada umur 16-18 tahun sebesar 58,53 persen dan semakin besar persentasenya seiring meningkatnya usia kawin pertama. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pemuda semakin tertunda umur kawin pertamanya.

<https://jateng.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN

<https://intertips.go.id>



Ketenagakerjaan

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah diungkapkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja penting dilakukan mengingat peran sertanya dalam pembangunan nasional. Informasi ketenagakerjaan diperlukan dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Semakin lengkap dan akurat informasi ketenagakerjaan yang tersedia, maka perencanaan pembangunan akan semakin jelas dan tepat sasaran.

Pembangunan ketenagakerjaan tidak terlepas dari pembangunan kepemudaan. Pemuda memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, termasuk diantaranya memasuki usia kerja. Pemuda memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Beberapa kebijakan perlu dikeluarkan untuk tenaga kerja pemuda, diantaranya pemberian pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja pemuda pada sektor-sektor penting yang sesuai dengan kondisi pemuda.

Pembahasan kondisi ketenagakerjaan pemuda pada bab ini meliputi partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pendapatan/upah/gaji bersih yang diterima oleh tenaga kerja pemuda. Pembahasan kondisi dan situasi ketenagakerjaan pemuda pada bagian ini memberikan gambaran secara makro mengenai peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

6.1 Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

Partisipasi Pemuda di Jawa Tengah dalam kegiatan ekonomi cukup besar, ini terlihat dari tingginya persentase pemuda yang berstatus bekerja, yaitu sebanyak 53,55 persen (Tabel 6.1). Pemuda yang menganggur sebanyak 7,80 persen. Sementara itu pemuda yang kegiatan utamanya masih sekolah sebanyak 17,11 persen, dan yang mengurus rumah tangga sebanyak 18,55 persen serta sisanya 2,99 persen melakukan kegiatan lainnya. Dilihat dari jenis kelamin, persentase pemuda perempuan yang bekerja lebih rendah (42,02 persen) dibanding pemuda laki-laki (64,71 persen), persentase pemuda perempuan yang menganggur juga lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 5,47 persen berbanding 10,06 persen. Lebih rendahnya persentase pemuda perempuan yang bekerja dan pengangguran berkaitan dengan tugas perempuan

mengurus rumah tangga. Persentase pemuda perempuan yang mengurus rumah tangga relatif besar, yaitu 34,20 persen.

Tabel 6.1
Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2016

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Bekerja	Pengang- guran	Seko- lah	Mengurus Rumah Tangga	Lain- nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	60,64	10,98	19,43	4,74	4,21	100,00
Perempuan	48,00	5,55	18,87	26,02	1,56	100,00
Total	54,39	8,29	19,15	15,27	2,90	100,00
Perdesaan						
Laki-laki	68,98	9,10	16,00	1,98	3,93	100,00
Perempuan	35,60	5,38	13,84	42,99	2,19	100,00
Total	52,65	7,28	14,95	22,03	3,08	100,00
Total						
Laki-laki	64,71	10,06	17,76	3,40	4,07	100,00
Perempuan	42,02	5,47	16,45	34,20	1,87	100,00
Total	53,55	7,80	17,11	18,55	2,99	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2016

Dilihat dari tempat tinggal, persentase pemuda yang bekerja di perdesaan lebih rendah (52,65 persen) dibanding perkotaan (54,39 persen). Persentase pemuda laki-laki di perdesaan yang bekerja adalah 68,98 persen, sementara pemuda laki-laki di perkotaan yang bekerja adalah 60,64 persen. Hal sebaliknya terjadi pada pemuda perempuan, persentase pemuda perempuan di perkotaan yang bekerja relatif lebih tinggi dibanding pemuda perempuan di perdesaan, yaitu 48,00 persen berbanding 35,60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pemuda laki-laki di perdesaan mempunyai kecenderungan untuk bekerja lebih besar daripada pemuda laki-laki di perkotaan,

sebaliknya pemuda perempuan di perdesaan mempunyai kecenderungan untuk bekerja lebih rendah dibanding pemuda perempuan di perkotaan.

Disisi lain, pemuda di perkotaan yang sekolah cenderung lebih tinggi (19,15 persen) dibanding pemuda di perdesaan yang sekolah (19,15 persen), kondisi yang sama terjadi baik pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan pemuda di perkotaan untuk sekolah lebih tinggi dibanding pemuda di perdesaan.

Tabel 6.2
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	SD ke bawah	SMP	SM	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Laki-laki	18,83	31,68	15,89	33,59	100,00
Perempuan	13,38	25,24	19,99	41,39	100,00
Total	16,45	28,86	17,68	37,00	100,00
Perdesaan					
Laki-laki	31,78	32,14	14,43	21,64	100,00
Perempuan	20,43	39,09	17,94	22,53	100,00
Total	28,03	34,44	15,59	21,94	100,00
Total					
Laki-laki	25,58	31,92	15,13	27,37	100,00
Perempuan	16,26	30,90	19,15	33,69	100,00
Total	21,98	31,52	16,69	29,81	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2016

Tabel 6.2 menunjukkan persentase pemuda menurut tipe daerah, jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Persentase terbesar pemuda yang bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu 31,52 persen. Kemudian diikuti

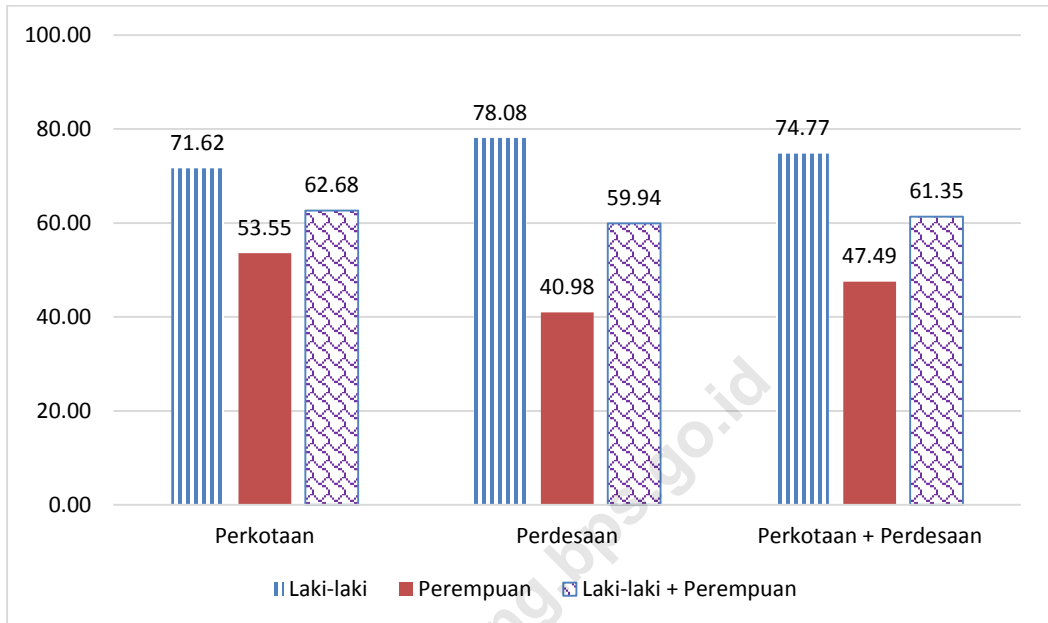
pekerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi, yaitu 29,81 persen dan yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 21,98 persen.

Dilihat dari jenis kelamin, persentase pemuda perempuan yang bekerja dan berpendidikan Perguruan Tinggi lebih besar dibanding pemuda laki-laki yaitu 33,69 persen berbanding 27,37 persen. Sebaliknya, pada pendidikan lebih rendah, yaitu SD ke bawah dan SMP, persentase pemuda perempuan yang bekerja lebih rendah dibanding pemuda laki-laki.

Pemuda di perkotaan yang mempunyai pendidikan perguruan tinggi dan bekerja ada sebanyak 37,00 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan pemuda di perdesaan yang sebesar 21,94 persen. Sementara itu pada pendidikan SD ke bawah pemuda perkotaan yang bekerja lebih sedikit dibandingkan pemuda perdesaan, yaitu 16,45 persen berbanding 28,03 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan pemuda yang bekerja di perkotaan mempunyai pendidikan lebih tinggi dibanding pemuda di perdesaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 6.1. TPAK pemuda adalah sebesar 61,35 persen, TPAK perempuan cenderung lebih rendah dibanding TPAK laki-laki, yaitu 47,49 persen berbanding 74,77 persen. TPAK pemuda di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK di perdesaan, yaitu 62,68 persen berbanding 59,94 persen. Lebih tingginya TPAK laki-laki dibanding perempuan berkaitan erat dengan tugas utama perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Lebih tingginya TPAK di perkotaan berkaitan erat dengan kondisi geografis serta tuntutan hidup yang lebih tinggi di perkotaan.

Gambar 6.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda menurut Jenis Kelamin dan
Tipe Daerah, 2016



Sumber: BPS, Sakernas 2016

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pemuda pada kelompok umur 16-20 tahun adalah sebesar 41,37 persen, sementara itu pada kelompok umur 21-25 tahun TPAK pemuda sebesar 87,76 persen dan pada kelompok umur 26-30 tahun adalah 71,36 (Tabel 6.3). TPAK laki-laki cenderung naik seiring dengan naiknya kelompok umur pemuda, TPAK pemuda laki-laki umur 16-20 tahun sebesar 46,52 persen, pada umur 21-25 tahun naik menjadi 87,18 persen dan pada umur 26-30 tahun naik lagi menjadi 94,67. Berbeda dengan pola TPAK pemuda laki-laki, pola TPAK pemuda perempuan cenderung tinggi pada umur 21-25 tahun dan turun kembali pada umur 26-30 tahun.

Perbedaan peran antara pemuda laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga diduga merupakan faktor utama yang menyebabkan TPAK pemuda perempuan cenderung turun pada umur 26-30 tahun. Pada umur tersebut ada kecenderungan pemuda perempuan tidak masuk ke pasar kerja dan lebih memilih mengurus rumah tangga.

Tabel 6.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda menurut Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur, 2016

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			TPAK Pemuda
	16-20	21-25	26-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	46,52	87,76	94,67	74,77
Perempuan	35,90	58,44	48,98	47,49
Laki-Laki + Perempuan	41,37	73,58	71,36	61,35

Sumber: BPS, Sakernas 2016

6.2 Lapangan Usaha

Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi beberapa sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk melihat gambaran secara makro struktur perekonomian suatu wilayah serta perkembangannya.

Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja pemuda terbesar adalah sektor Jasa, yaitu sebesar 44,30 persen, dan kemudian diikuti sektor Manufaktur, yaitu 39,17 persen. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor yang kurang diminati oleh pemuda, yaitu hanya 16,53 persen. Kemudahan dalam memasuki usaha sektor jasa dimungkinkan menjadi faktor utama yang menjadi daya tarik bagi pemuda untuk memasuki sektor ini.

Dilihat dari jenis kelamin, kecenderungan pemuda perempuan bekerja di sektor jasa lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 52,00 persen berbanding 39,47 persen. Sementara di sektor pertanian dan manufaktur kecenderungan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 6.4
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, 2016

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin		Lapangan Usaha			Total
		A (Pertanian)	M (Manufaktur)	S (Jasa)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)	Laki-Laki (L)	9,47	42,43	48,11	100,00
	Perempuan (P)	2,64	41,89	55,47	100,00
	L + P	6,48	42,19	51,33	100,00
Perdesaan (D)	Laki-Laki (L)	31,70	36,75	31,55	100,00
	Perempuan (P)	18,99	34,05	46,96	100,00
	L + P	27,51	35,86	36,62	100,00
K + D	Laki-Laki (L)	21,07	39,46	39,47	100,00
	Perempuan (P)	9,30	38,69	52,00	100,00
	L + P	16,53	39,17	44,30	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2016

Dilihat dari tempat tinggal, persentase pemuda yang bekerja di sektor pertanian lebih tinggi di perdesaan (27,51 persen) dibanding perkotaan (6,48 persen), hal ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis antara perdesaan dan perkotaan.

6.3 Status Pekerjaan

Distribusi pemuda menurut status pekerjaan dapat digunakan untuk mengetahui gambaran struktur kedudukan pemuda dalam pekerjaan. Status pekerjaan dalam hal ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh/karyawan, buruh/karyawan, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar.

Lebih dari setengah pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan (56,34 persen). Dan selebihnya adalah sebagai pekerja bebas (12,02 persen), pekerja tidak dibayar (15,26 persen) bekerja sendiri (9,42 persen), dan hanya 6,95 persen yang

bekerja dibantu buruh/karyawan. Kondisi ini memberikan gambaran masih rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda untuk menciptakan lapangan usahanya sendiri.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa persentase pemuda yang berwirausaha (berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh/karyawan) lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan, yaitu 19,13 persen berbanding 13,86 persen (Tabel 6.5). Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal status pekerjaan, perempuan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi buruh/karyawan (63,36 persen) dibanding laki-laki (51,93 persen). Sebaliknya kecenderungan bekerja sebagai pekerja bebas lebih tinggi laki-laki (17,28 persen) dibanding perempuan (3,66 persen) (Tabel 6.6).

Tabel 6.5
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2016

Status Pekerjaan	Perkotaan (K)	Perdesaaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja Sendiri	8,75	10,15	9,42
Bekerja Dibantu Buruh/Karyawan	5,11	8,98	6,95
Buruh/Karyawan	67,93	43,65	56,34
Pekerja Bebas	7,57	16,90	12,02
Pekerja Tak Dibayar	10,64	20,32	15,26
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2016

Tabel 6.6
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan
Jenis Kelamin, 2016

Status Pekerjaan	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja Sendiri	8,81	10,40	9,42
Bekerja Dibantu Buruh/Karyawan	7,11	6,71	6,95
Buruh/Karyawan	51,93	63,36	56,34
Pekerja Bebas	17,28	3,66	12,02
Pekerja Tak Dibayar	14,88	15,87	15,26
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2016

Tabel 6.7 menunjukkan persentase pemuda menurut status pekerjaan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Masih ada kecenderungan pemuda yang berpendidikan tinggi (PT) untuk bekerja sebagai buruh/karyawan. Persentase pemuda yang berpendidikan PT yang bekerja sebagai buruh adalah 41,46 persen, sementara itu yang bekerja sendiri sebesar 22,24 persen dan 17,03 persen yang bekerja dibantu buruh/karyawan. Masih ada sebesar 16,96 persen yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar dan 4,91 persen yang bekerja sebagai pekerja bebas. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi yang diperoleh bukan merupakan jaminan bagi pemuda untuk dapat masuk ke pasar kerja dan menempati posisi nyaman. Oleh karena itu perlu upaya khusus dari pemerintah untuk dapat memberdayakan tenaga kerja terdidik tersebut.

Tabel 6.7
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016

Status Pekerjaan	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Total
	Tidak Punya ijazah	SD	SMP	SM	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja Sendiri	2,32	24,95	31,59	18,89	22,24	100,00
Bekerja Dibantu Buruh/Karyawan	3,37	21,51	44,15	13,95	17,03	100,00
Buruh/Karyawan	1,80	12,48	25,31	18,95	41,46	100,00
Pekerja Bebas	8,96	35,45	46,46	4,22	4,91	100,00
Pekerja Tak Dibayar	3,20	24,91	36,91	18,02	16,96	100,00
Total	3,04	18,94	31,52	16,69	29,81	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2016

6.4 Jam Kerja

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur ketentuan jam kerja bagi pekerja yaitu maksimal 40 jam dalam seminggu, dan selanjutnya kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur. Pada tabel 6.8 memperlihatkan persentase pemuda yang bekerja menurut jam kerja dan jenis kelamin. Sebagian besar pemuda yang bekerja telah memenuhi lebih dari 35 jam seminggu, yaitu 78,01 persen. Ini memperlihatkan bahwa secara umum pemuda Jawa Tengah telah memenuhi standar jam kerja normal.

Pemuda laki-laki yang memenuhi jam kerja lebih dari 35 jam seminggu sebesar 82,12 persen, relatif lebih tinggi dibanding pemuda perempuan (71,49 persen), sebaliknya pemuda perempuan yang bekerja dibawah 15 jam seminggu cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 7,05 persen berbanding 2,25 persen. Lebih tingginya persentase pemuda perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal berkaitan dengan tanggung jawab utamanya sebagai pengurus rumah tangga sehingga

bekerja merupakan salah satu pemanfaatan waktu yang ada agar dapat menambah penghasilan rumah tangga.

Tabel 6.8
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jam Kerja dan
Jenis Kelamin, 2016

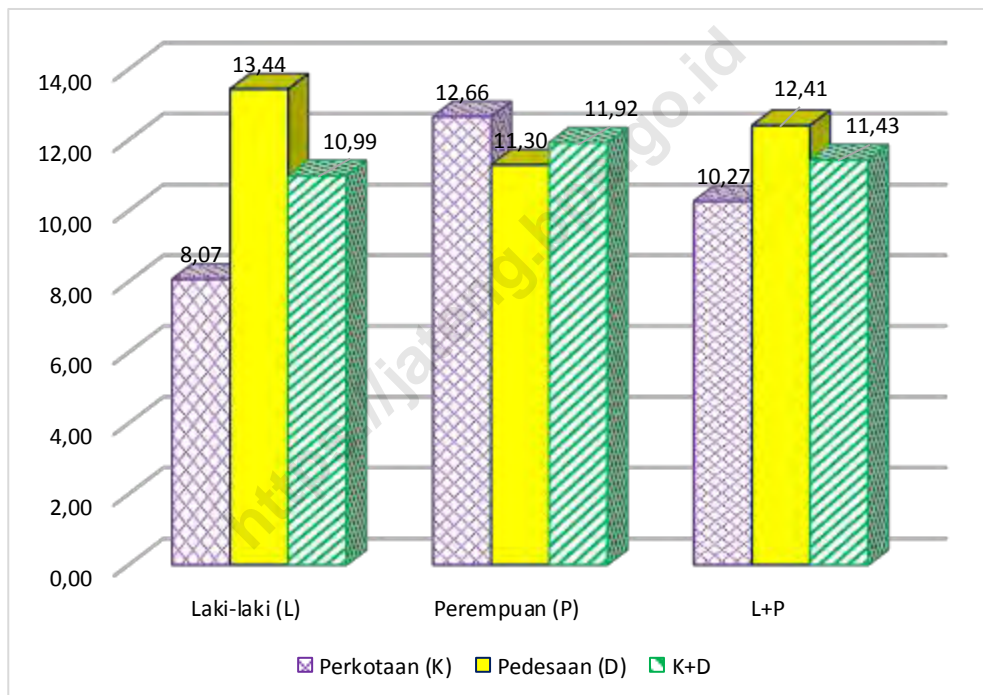
Jam Kerja	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
≤7	0,73	1,49	1,02
8-14	1,52	5,56	3,08
15-21	3,85	6,07	4,71
22-28	6,08	6,54	6,26
29-35	5,70	8,86	6,92
>35	82,12	71,49	78,01
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2016

Berdasarkan jumlah jam kerja seminggu, pemuda yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dapat dikategorikan sebagai setengah pengangguran. Proporsi pemuda setengah pengangguran menurut jenis kelamin dan tipe daerah dapat dilihat pada Gambar 6.2. Sebanyak 11,43 persen pemuda bekerja kurang dari 35 jam. Jika dibandingkan menurut tipe daerah terlihat bahwa proporsi setengah pengangguran pemuda di perdesaan (12,41 persen) lebih besar dibandingkan pemuda di perkotaan (10,27 persen). Perbedaan lapangan usaha utama antara perkotaan dan perdesaan diduga menjadi salah satu faktor lebih tingginya setengah pengangguran di perdesaan. Sektor lapangan usaha pertanian, pada musim tertentu seperti saat menunggu panen cenderung memerlukan jam kerja yang lebih pendek, sementara di perkotaan dengan lapangan usaha utama sektor jasa, perdagangan dan industri cenderung mempunyai jam kerja standar dan tetap sepanjang tahun.

Dilihat dari jenis kelamin, proporsi pemuda perempuan setengah pengangguran (11,92 persen) lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki (10,99 persen), dan proporsi pemuda setengah pengangguran tertinggi adalah pemuda laki-laki di pedesaan, yaitu 13,44 persen. Sementara proporsi setengah pengangguran terendah adalah pemuda laki-laki di perkotaan yaitu sebesar 8,07 persen.

Gambar 6.2
Proporsi Pemuda Setengah Pengangguran menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016



Sumber: BPS, Sakernas 2016

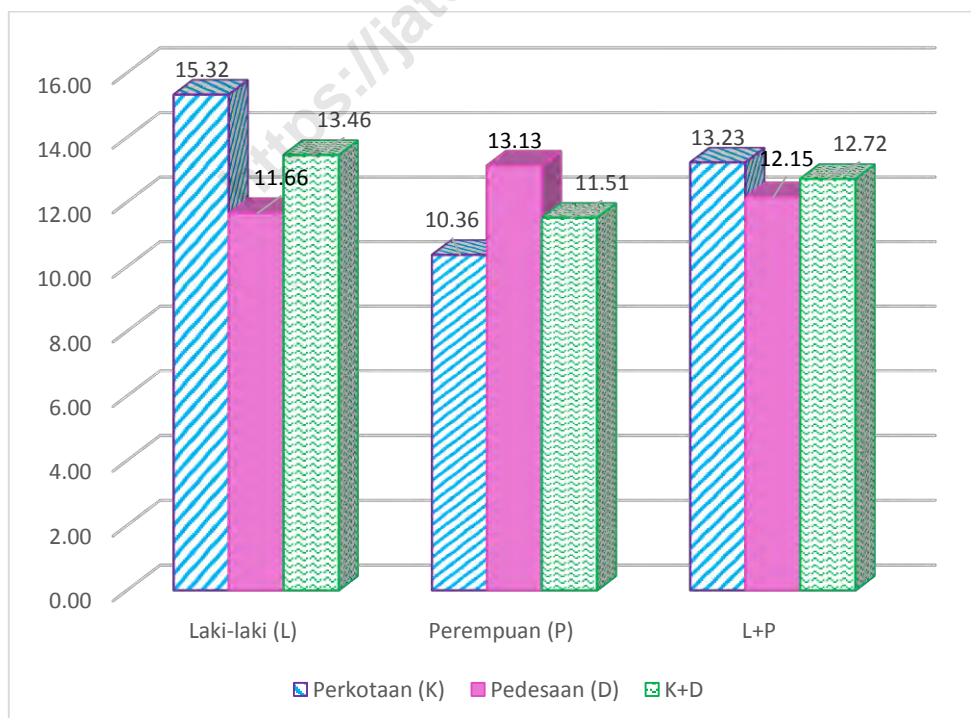
6.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang selalu mendapat perhatian yang serius. Di Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu fokus kebijakan dengan dituangkannya indikator ini dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Pengangguran bisa menjadi sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pengangguran yang terjadi pada pemuda merupakan pukulan bagi perekonomian daerah. Pemuda yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam pembangunan perekonomian tetapi pada kenyataannya justru menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Masalah pengangguran merupakan masalah kompleks yang menjadi tanggung jawab bersama oleh karena itu penanggulangan pengangguran perlu melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah dapat dilihat pada Gambar 6.3. TPT pemuda Jawa Tengah pada tahun 2016 adalah 12,72 persen, TPT pemuda di perkotaan adalah 13,23 persen dan di pedesaan adalah 12,15 persen.

Gambar 6.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2016



Sumber: BPS, Sakernas 2016

Dilihat dari jenis kelamin, TPT pemuda perempuan lebih rendah dibandingkan TPT pemuda laki-laki, yang mana TPT pemuda perempuan adalah 11,51 persen dan TPT pemuda laki-laki sebesar 13,46 persen. Jika diperhatikan lebih lanjut, TPT pemuda laki-laki di perkotaan adalah yang tertinggi, yaitu 15,32 persen. Kota sebagai tujuan migrasi yang menjanjikan lapangan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi merupakan faktor penarik bagi pemuda terutama pemuda laki-laki sehingga secara tidak langsung mempengaruhi TPT di perkotaan.

Tabel 6.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan (K)	Perdesaaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijasah	23,64	7,00	13,11
SD	5,91	5,81	5,85
SMP	7,17	10,91	9,16
SM	14,13	11,05	12,79
PT	18,92	21,20	19,73
Total	13,24	12,15	12,72

Sumber: BPS, Sakernas 2016

Tabel 6.9 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah. Tingkat pengangguran pada pemuda dengan pendidikan SMP dan SD masing-masing adalah 13,11 persen dan 5,85 persen dan yang tidak punya ijazah adalah 13,11 persen. Sementara itu pada pendidikan SM dan PT masing-masing adalah 12,79 persen dan 19,73 persen. Dari data tersebut diduga ada indikasi lebih besarnya pengangguran pemuda terdidik daripada pengangguran pemuda dengan pendidikan rendah.

Jika dibandingkan menurut tipe daerah tempat tinggal, terlihat bahwa tingkat pengangguran di perdesaan tertinggi adalah pada pemuda dengan pendidikan PT di 21,20 persen, sedangkan yang paling rendah adalah tingkat pengangguran pemuda yang tidak memiliki ijazah (7,00 persen). Sementara itu, di perkotaan tingkat pengangguran tertinggi pada pemuda yang tidak memiliki ijazah, yaitu 23,64 persen, dan tingkat pengangguran paling rendah adalah pemuda dengan pendidikan SD, yaitu 5,91 persen.

Ada kecenderungan pemuda dengan tingkat pendidikan rendah memiliki TPT rendah, hal ini dimungkinkan karena pemuda dengan pendidikan rendah cenderung menerima pekerjaan apa saja. Sementara itu pemuda dengan pendidikan tinggi mempunyai kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang sepadan dengan pendidikannya sehingga ketika tidak ada kesempatan kerja yang sesuai mereka cenderung menganggur. Dalam hal ini perlu adanya kebijakan pembangunan yang dapat menciptakan peluang bagi pemuda terdidik untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan usahanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Pemuda Indonesia 2014. Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_40.pdf . Diakses tanggal 19 Mei 2016

Munzir Arsyuddin. 2013. Peran Pemuda dalam Kemajuan Bangsa. http://www.kompasiana.com/pondokmunzir/peran-pemuda-dalam-kemajuan-bangsa_552ad07bf17e61fc43d62417 . Diakses 31 Agustus 2016.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. 2014. Semarang.

Suryanto, Bagong dan Septi Ariadi. 2013. "Penanganan Pengangguran Terdidik Jawa Timur". Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26 No.4 Tahun 2013, hal 257-264. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkp91fd6de1b0full.pdf>. Diakses 15 September 2016

LAMPIRAN

<https://jurnal.bps.go.id>

Tabel 3.1.1 Proporsi Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Perkotaan
	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)
01. Cilacap	20,49	19,20	19,85
02. Banyumas	20,62	20,25	20,44
03. Purbalingga	21,34	21,79	21,57
04. Banjarnegara	22,65	19,48	21,07
05. Kebumen	18,70	17,59	18,14
06. Purworejo	19,92	19,46	19,68
07. Wonosobo	21,19	22,10	21,64
08. Magelang	21,22	20,20	20,71
09. Boyolali	20,08	19,63	19,85
10. Klaten	20,69	19,88	20,28
11. Sukoharjo	21,19	22,79	22,00
12. Wonogiri	16,13	16,56	16,35
13. Karanganyar	24,80	20,43	22,58
14. Sragen	21,80	19,92	20,84
15. Grobogan	22,15	22,48	22,32
16. Blora	20,43	18,80	19,60
17. Rembang	23,96	22,46	23,21
18. Pati	20,77	21,00	20,89
19. Kudus	24,99	26,02	25,51
20. Jepara	25,05	22,00	23,52
21. Demak	26,75	26,34	26,55
22. Semarang	24,50	22,87	23,66
23. Temanggung	21,20	20,47	20,83
24. Kendal	24,51	21,77	23,15
25. Batang	24,92	22,36	23,64
26. Pekalongan	23,99	24,11	24,05
27. Pemasang	22,22	22,57	22,39
28. Tegal	23,82	22,13	22,97
29. Brebes	25,08	23,73	24,41
71. Kota Magelang	22,86	20,85	21,84
72. Kota Surakarta	26,22	24,23	25,20
73. Kota Salatiga	26,57	26,44	26,50
74. Kota Semarang	27,10	26,39	26,74
75. Kota Pekalongan	22,95	22,78	22,87
76. Kota Tegal	26,29	22,84	24,55
Jawa Tengah	23,29	22,34	22,81

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.1.2 Proporsi Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Perdesaan
	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)
01. Cilacap	20,61	19,05	19,83
02. Banyumas	21,58	21,05	21,31
03. Purbalingga	20,80	21,78	21,30
04. Banjarnegara	21,63	20,27	20,95
05. Kebumen	19,80	17,82	18,81
06. Purworejo	17,04	16,51	16,78
07. Wonosobo	21,59	19,19	20,41
08. Magelang	21,90	20,07	20,99
09. Boyolali	19,92	20,04	19,98
10. Klaten	20,90	17,88	19,36
11. Sukoharjo	24,33	21,29	22,81
12. Wonogiri	14,56	15,21	14,90
13. Karanganyar	21,19	21,68	21,44
14. Sragen	20,96	18,44	19,68
15. Grobogan	22,64	20,71	21,67
16. Blora	19,34	20,30	19,83
17. Rembang	23,13	22,33	22,73
18. Pati	21,76	20,03	20,87
19. Kudus	26,11	23,86	24,97
20. Jepara	21,29	23,38	22,34
21. Demak	25,13	23,53	24,32
22. Semarang	22,00	23,41	22,71
23. Temanggung	20,58	19,94	20,26
24. Kendal	22,73	20,65	21,71
25. Batang	25,34	23,22	24,28
26. Pekalongan	23,54	24,62	24,09
27. Pemasang	21,92	21,42	21,66
28. Tegal	22,16	22,85	22,51
29. Brebes	24,25	21,47	22,87
71. Kota Magelang	-	-	-
72. Kota Surakarta	-	-	-
73. Kota Salatiga	-	-	-
74. Kota Semarang	22,04	24,63	23,25
75. Kota Pekalongan	29,35	31,09	30,18
76. Kota Tegal	-	-	-
Jawa Tengah	21,49	20,51	21,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.1.3 Proporsi Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
	(1)	(2)	
01. Cilacap	20,56	19,10	19,84
02. Banyumas	21,07	20,62	20,85
03. Purbalingga	20,98	21,78	21,38
04. Banjarnegara	21,88	20,07	20,98
05. Kebumen	19,50	17,76	18,62
06. Purworejo	17,89	17,39	17,63
07. Wonosobo	21,49	19,91	20,71
08. Magelang	21,70	20,11	20,91
09. Boyolali	19,97	19,90	19,94
10. Klaten	20,76	19,25	19,99
11. Sukoharjo	21,89	22,46	22,18
12. Wonogiri	14,90	15,50	15,21
13. Karanganyar	23,06	21,02	22,03
14. Sragen	21,24	18,93	20,07
15. Grobogan	22,56	21,02	21,78
16. Blora	19,61	19,93	19,77
17. Rembang	23,38	22,37	22,87
18. Pati	21,41	20,37	20,87
19. Kudus	25,23	25,55	25,40
20. Jepara	23,58	22,54	23,06
21. Demak	25,76	24,62	25,18
22. Semarang	23,01	23,18	23,10
23. Temanggung	20,74	20,08	20,41
24. Kendal	23,60	21,20	22,42
25. Batang	25,17	22,87	24,01
26. Pekalongan	23,78	24,36	24,07
27. Pemasang	22,07	22,01	22,04
28. Tegal	23,14	22,42	22,78
29. Brebes	24,62	22,47	23,55
71. Kota Magelang	22,86	20,85	21,84
72. Kota Surakarta	26,22	24,23	25,20
73. Kota Salatiga	26,57	26,44	26,50
74. Kota Semarang	27,01	26,36	26,68
75. Kota Pekalongan	23,06	22,92	22,99
76. Kota Tegal	26,29	22,84	24,55
Jawa Tengah	22,33	21,37	21,85

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.2.1 Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Perkotaan
	16-20	21-25	26-30	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cilacap	36,14	32,63	31,23	100,00
02. Banyumas	37,44	29,49	33,07	100,00
03. Purbalingga	36,29	31,93	31,78	100,00
04. Banjarnegara	31,98	31,27	36,74	100,00
05. Kebumen	35,92	27,07	37,01	100,00
06. Purworejo	38,85	33,88	27,27	100,00
07. Wonosobo	33,01	32,04	34,95	100,00
08. Magelang	36,28	28,81	34,91	100,00
09. Boyolali	37,74	31,80	30,46	100,00
10. Klaten	35,01	34,32	30,67	100,00
11. Sukoharjo	32,07	35,67	32,26	100,00
12. Wonogiri	36,30	34,87	28,83	100,00
13. Karanganyar	36,78	36,04	27,18	100,00
14. Sragen	36,32	31,46	32,22	100,00
15. Grobogan	35,53	29,51	34,96	100,00
16. Blora	28,64	29,22	42,14	100,00
17. Rembang	31,20	34,06	34,74	100,00
18. Pati	34,76	27,31	37,93	100,00
19. Kudus	34,14	34,29	31,57	100,00
20. Jepara	31,54	37,44	31,02	100,00
21. Demak	38,69	38,32	22,99	100,00
22. Semarang	32,46	36,84	30,70	100,00
23. Temanggung	34,61	36,90	28,49	100,00
24. Kendal	33,65	35,53	30,82	100,00
25. Batang	36,35	34,22	29,43	100,00
26. Pekalongan	36,94	33,54	29,52	100,00
27. Pemalang	34,08	33,10	32,82	100,00
28. Tegal	37,14	32,49	30,37	100,00
29. Brebes	33,29	28,23	38,48	100,00
71. Kota Magelang	35,94	35,76	28,30	100,00
72. Kota Surakarta	37,04	36,46	26,50	100,00
73. Kota Salatiga	34,31	32,48	33,21	100,00
74. Kota Semarang	30,72	36,05	33,22	100,00
75. Kota Pekalongan	35,31	35,83	28,86	100,00
76. Kota Tegal	33,27	34,14	32,59	100,00
Jawa Tengah	34,49	33,60	31,91	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.2.2 Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Perdesaan
	16-20	21-25	26-30	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cilacap	35,93	31,55	32,52	100,00
02. Banyumas	36,42	29,54	34,03	100,00
03. Purbalingga	35,74	29,09	35,17	100,00
04. Banjarnegara	32,36	34,28	33,36	100,00
05. Kebumen	37,07	30,40	32,53	100,00
06. Purworejo	35,25	33,11	31,64	100,00
07. Wonosobo	33,46	34,38	32,16	100,00
08. Magelang	37,53	33,53	28,93	100,00
09. Boyolali	30,34	34,56	35,10	100,00
10. Klaten	31,12	32,73	36,15	100,00
11. Sukoharjo	27,01	42,81	30,18	100,00
12. Wonogiri	31,65	30,14	38,21	100,00
13. Karanganyar	29,68	31,72	38,60	100,00
14. Sragen	29,95	35,39	34,66	100,00
15. Grobogan	33,46	29,65	36,89	100,00
16. Blora	28,50	33,02	38,48	100,00
17. Rembang	31,68	33,68	34,64	100,00
18. Pati	36,47	30,57	32,97	100,00
19. Kudus	32,44	31,64	35,92	100,00
20. Jepara	28,72	35,87	35,41	100,00
21. Demak	31,02	36,03	32,95	100,00
22. Semarang	30,72	39,76	29,52	100,00
23. Temanggung	33,29	32,44	34,26	100,00
24. Kendal	30,68	35,20	34,12	100,00
25. Batang	34,13	36,78	29,09	100,00
26. Pekalongan	33,63	39,28	27,08	100,00
27. Pemalang	33,71	40,05	26,24	100,00
28. Tegal	33,09	36,53	30,38	100,00
29. Brebes	35,20	34,87	29,93	100,00
71. Kota Magelang	-	-	-	-
72. Kota Surakarta	-	-	-	-
73. Kota Salatiga	-	-	-	-
74. Kota Semarang	21,73	59,03	19,24	100,00
75. Kota Pekalongan	39,07	31,50	29,43	100,00
76. Kota Tegal	-	-	-	-
Jawa Tengah	33,28	33,75	32,97	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.2.3 Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota, dan Kelompok Umur, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Perkotaan + Perdesaan			
	Kelompok Umur			Total
	16-20	21-25	26-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Cilacap	36,00	31,94	32,06	100,00
02. Banyumas	36,95	29,52	33,53	100,00
03. Purbalingga	35,92	30,01	34,07	100,00
04. Banjarnegara	32,27	33,53	34,20	100,00
05. Kebumen	36,75	29,50	33,75	100,00
06. Purworejo	36,44	33,37	30,20	100,00
07. Wonosobo	33,35	33,78	32,88	100,00
08. Magelang	37,17	32,17	30,66	100,00
09. Boyolali	32,84	33,63	33,53	100,00
10. Klaten	33,82	33,83	32,35	100,00
11. Sukoharjo	30,91	37,30	31,79	100,00
12. Wonogiri	32,73	31,24	36,03	100,00
13. Karanganyar	33,47	34,03	32,50	100,00
14. Sragen	32,16	34,03	33,81	100,00
15. Grobogan	33,83	29,63	36,54	100,00
16. Blora	28,54	32,09	39,37	100,00
17. Rembang	31,54	33,80	34,67	100,00
18. Pati	35,87	29,43	34,70	100,00
19. Kudus	33,77	33,73	32,50	100,00
20. Jepara	30,47	36,85	32,68	100,00
21. Demak	34,15	36,96	28,88	100,00
22. Semarang	31,45	38,53	30,02	100,00
23. Temanggung	33,65	33,64	32,72	100,00
24. Kendal	32,19	35,36	32,45	100,00
25. Batang	35,04	35,73	29,23	100,00
26. Pekalongan	35,38	36,25	28,37	100,00
27. Pemalang	33,90	36,41	29,69	100,00
28. Tegal	35,51	34,12	30,37	100,00
29. Brebes	34,32	31,82	33,86	100,00
71. Kota Magelang	35,94	35,76	28,30	100,00
72. Kota Surakarta	37,04	36,46	26,50	100,00
73. Kota Salatiga	34,31	32,48	33,21	100,00
74. Kota Semarang	30,59	36,38	33,02	100,00
75. Kota Pekalongan	35,39	35,73	28,88	100,00
76. Kota Tegal	33,27	34,14	32,59	100,00
Jawa Tengah	33,87	33,68	32,45	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.3 Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Cilacap	55,42	43,00	1,45	0,13	100,00
02. Banyumas	61,12	37,71	1,03	0,14	100,00
03. Purbalingga	49,85	48,77	1,05	0,33	100,00
04. Banjarnegara	44,39	54,47	1,14	0,00	100,00
05. Kebumen	56,75	42,63	0,32	0,30	100,00
06. Purworejo	54,31	44,71	0,98	0,00	100,00
07. Wonosobo	44,41	53,81	1,78	0,00	100,00
08. Magelang	56,92	42,82	0,26	0,00	100,00
09. Boyolali	53,83	46,02	0,15	0,00	100,00
10. Klaten	68,00	30,71	1,29	0,00	100,00
11. Sukoharjo	63,43	36,06	0,51	0,00	100,00
12. Wonogiri	51,74	47,32	0,94	0,00	100,00
13. Karanganyar	58,96	39,79	1,25	0,00	100,00
14. Sragen	51,18	47,56	0,41	0,85	100,00
15. Grobogan	47,58	51,23	1,19	0,00	100,00
16. Blora	40,88	57,38	1,54	0,20	100,00
17. Rembang	45,60	52,78	1,62	0,00	100,00
18. Pati	51,17	48,01	0,36	0,46	100,00
19. Kudus	59,23	39,19	0,75	0,83	100,00
20. Jepara	48,56	50,20	1,24	0,00	100,00
21. Demak	60,19	38,81	1,00	0,00	100,00
22. Semarang	51,18	46,75	1,56	0,51	100,00
23. Temanggung	47,86	50,21	1,71	0,21	100,00
24. Kendal	58,70	39,99	1,31	0,00	100,00
25. Batang	53,90	43,36	2,74	0,00	100,00
26. Pekalongan	64,00	35,04	0,50	0,46	100,00
27. Pemasang	55,05	44,06	0,76	0,14	100,00
28. Tegal	66,10	32,96	0,67	0,27	100,00
29. Brebes	49,34	48,59	1,86	0,21	100,00
71. Kota Magelang	73,25	25,01	1,42	0,31	100,00
72. Kota Surakarta	74,82	24,66	0,53	0,00	100,00
73. Kota Salatiga	70,98	27,62	1,03	0,36	100,00
74. Kota Semarang	67,44	31,51	1,05	0,00	100,00
75. Kota Pekalongan	69,57	29,91	0,52	0,00	100,00
76. Kota Tegal	67,42	30,76	1,82	0,00	100,00
Jawa Tengah	56,22	42,55	1,07	0,16	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.4 Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Tipe Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Cilacap	15,77	1,26	7,81	9,35	8,80
02. Banyumas	15,12	4,66	11,11	8,68	9,94
03. Purbalingga	10,50	1,10	3,29	6,79	5,65
04. Banjarnegara	15,40	0,54	5,66	9,19	8,31
05. Kebumen	10,75	0,84	5,71	6,11	6,00
06. Purworejo	14,30	1,07	7,21	7,93	7,70
07. Wonosobo	15,89	1,75	9,97	8,92	9,19
08. Magelang	13,59	0,00	8,53	6,49	7,08
09. Boyolali	17,38	0,39	6,01	10,18	8,77
10. Klaten	9,37	0,61	4,91	5,44	5,07
11. Sukoharjo	12,71	2,51	9,55	0,59	7,50
12. Wonogiri	5,79	0,74	3,32	3,09	3,14
13. Karanganyar	8,18	0,82	4,02	5,32	4,63
14. Sragen	14,89	2,06	5,21	10,58	8,72
15. Grobogan	23,56	1,58	11,09	13,22	12,84
16. Blora	20,95	0,49	12,27	9,90	10,48
17. Rembang	12,58	0,85	8,56	6,08	6,83
18. Pati	12,80	0,77	4,06	8,19	6,75
19. Kudus	10,52	0,98	6,41	2,81	5,65
20. Jepara	15,56	1,74	7,78	10,44	8,79
21. Demak	11,77	0,00	3,59	7,61	5,97
22. Semarang	15,62	3,52	12,13	7,50	9,44
23. Temanggung	12,16	0,28	7,09	6,05	6,33
24. Kendal	11,49	0,84	5,42	7,66	6,52
25. Batang	10,29	0,78	4,17	6,86	5,76
26. Pekalongan	9,74	1,01	3,45	7,36	5,30
27. Pemasang	7,67	0,97	4,96	3,55	4,29
28. Tegal	11,31	1,40	4,56	9,15	6,40
29. Brebes	14,36	1,55	6,87	9,48	8,28
71. Kota Magelang	13,56	9,57	11,63	0,00	11,63
72. Kota Surakarta	12,70	10,40	11,56	0,00	11,56
73. Kota Salatiga	15,56	13,84	14,69	0,00	14,69
74. Kota Semarang	17,42	4,06	10,82	1,48	10,69
75. Kota Pekalongan	7,03	0,91	3,74	14,52	3,98
76. Kota Tegal	18,40	4,25	11,75	0,00	11,75
Jawa Tengah	13,55	1,77	7,51	7,96	7,74

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.1 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Sekolah, Jawa Tengah 2016

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Tidak/belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	16-18	0,38	68,09	31,53	100,00
	19-24	0,64	19,88	79,49	100,00
	25-30	0,74	1,59	97,67	100,00
	Total	0,62	23,21	76,17	100,00
Perempuan	16-18	0,28	67,80	31,92	100,00
	19-24	0,51	23,31	76,18	100,00
	25-30	0,64	0,80	98,56	100,00
	Total	0,52	23,61	75,87	100,00
Laki-laki + Perempuan	16-18	0,33	67,95	31,72	100,00
	19-24	0,58	21,59	77,84	100,00
	25-30	0,69	1,20	98,11	100,00
Total		0,57	23,41	76,02	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.2 Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Status Sekolah Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Status Sekolah			Total
	Tidak/belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Cilacap	0,80	22,23	76,97	100,00
02. Banyumas	0,11	24,66	75,24	100,00
03. Purbalingga	0,16	21,19	78,65	100,00
04. Banjarnegara	0,60	14,71	84,70	100,00
05. Kebumen	0,30	28,11	71,59	100,00
06. Purworejo	0,19	27,58	72,23	100,00
07. Wonosobo	0,45	17,66	81,88	100,00
08. Magelang	0,29	22,53	77,18	100,00
09. Boyolali	1,36	19,42	79,22	100,00
10. Klaten	0,95	26,05	73,00	100,00
11. Sukoharjo	0,81	31,36	67,83	100,00
12. Wonogiri	0,97	19,93	79,10	100,00
13. Karanganyar	0,00	32,09	67,91	100,00
14. Sragen	0,87	22,16	76,97	100,00
15. Grobogan	0,24	20,40	79,36	100,00
16. Blora	0,42	15,95	83,63	100,00
17. Rembang	1,35	17,18	81,47	100,00
18. Pati	1,19	22,99	75,82	100,00
19. Kudus	0,83	26,71	72,46	100,00
20. Jepara	0,19	18,35	81,45	100,00
21. Demak	0,09	23,73	76,18	100,00
22. Semarang	0,33	21,93	77,74	100,00
23. Temanggung	0,23	20,96	78,81	100,00
24. Kendal	0,87	24,42	74,71	100,00
25. Batang	0,32	22,74	76,94	100,00
26. Pekalongan	0,92	20,96	78,12	100,00
27. Pemalang	0,38	18,03	81,59	100,00
28. Tegal	0,88	20,01	79,11	100,00
29. Brebes	0,92	16,75	82,33	100,00
71. Kota Magelang	0,00	36,46	63,54	100,00
72. Kota Surakarta	0,15	43,22	56,62	100,00
73. Kota Salatiga	0,37	30,89	68,74	100,00
74. Kota Semarang	0,59	36,30	63,11	100,00
75. Kota Pekalongan	0,42	26,64	72,95	100,00
76. Kota Tegal	0,48	27,57	71,95	100,00
Jawa Tengah	0,57	23,41	76,02	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.3 Persentase Pemuda yang Masih Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan				Total
	SD	SMP	SM	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Cilacap	0,00	7,88	75,51	16,61	100,00
02. Banyumas	0,00	6,55	74,19	19,26	100,00
03. Purbalingga	0,00	11,58	63,06	25,36	100,00
04. Banjarnegara	0,00	11,18	77,26	11,56	100,00
05. Kebumen	0,38	9,91	77,57	12,15	100,00
06. Purworejo	0,00	3,29	81,71	15,00	100,00
07. Wonosobo	0,00	14,88	70,91	14,20	100,00
08. Magelang	0,00	13,71	62,87	23,42	100,00
09. Boyolali	0,00	0,45	69,75	29,79	100,00
10. Klaten	0,67	2,03	63,27	34,02	100,00
11. Sukoharjo	0,00	2,40	52,98	44,63	100,00
12. Wonogiri	0,00	3,01	76,16	20,83	100,00
13. Karanganyar	0,00	8,48	58,08	33,44	100,00
14. Sragen	0,00	5,12	70,99	23,89	100,00
15. Grobogan	0,51	3,19	76,53	19,77	100,00
16. Blora	1,03	5,49	74,56	18,92	100,00
17. Rembang	0,00	12,93	74,36	12,71	100,00
18. Pati	0,00	5,13	81,34	13,53	100,00
19. Kudus	0,00	2,24	69,66	28,10	100,00
20. Jepara	0,00	2,33	76,40	21,27	100,00
21. Demak	0,00	5,10	67,55	27,35	100,00
22. Semarang	0,83	5,75	60,74	32,67	100,00
23. Temanggung	0,00	7,94	73,80	18,26	100,00
24. Kendal	0,00	6,14	69,26	24,60	100,00
25. Batang	0,00	7,24	66,90	25,86	100,00
26. Pekalongan	0,00	10,31	72,61	17,08	100,00
27. Pemasang	0,00	8,84	77,45	13,71	100,00
28. Tegal	0,00	3,27	73,05	23,68	100,00
29. Brebes	0,00	6,07	74,70	19,24	100,00
71. Kota Magelang	0,91	4,46	72,20	22,44	100,00
72. Kota Surakarta	0,21	1,49	42,02	56,28	100,00
73. Kota Salatiga	0,00	6,54	54,56	38,90	100,00
74. Kota Semarang	0,00	1,79	43,66	54,55	100,00
75. Kota Pekalongan	0,00	4,82	78,88	16,30	100,00
76. Kota Tegal	0,00	3,08	73,29	23,63	100,00
Jawa Tengah	0,11	5,71	67,24	26,94	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.4 Proporsi Pemuda yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin
Kelompok Umur dan Tipe Daerah, Jawa Tengah 2016

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	16-18	0,00	0,00	0,00
	19-24	0,15	0,58	0,37
	25-30	0,08	0,00	0,04
	Total	0,07	0,19	0,13
Perempuan	16-18	0,00	0,00	0,00
	19-24	0,14	0,30	0,23
	25-30	0,00	0,04	0,02
	Total	0,05	0,12	0,08
Laki-laki + Perempuan	16-18	0,00	0,00	0,00
	19-24	0,15	0,44	0,30
	25-30	0,04	0,02	0,03
Total		0,06	0,16	0,11

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.5

Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Total
	Tidak/belum Pernah Bersekolah	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Cilacap	0,80	3,09	15,81	41,37	38,93	100,00
02. Banyumas	0,11	1,83	14,53	41,07	42,46	100,00
03. Purbalingga	0,16	3,78	20,35	43,51	32,21	100,00
04. Banjarnegara	0,60	2,88	28,26	42,14	26,12	100,00
05. Kebumen	0,30	1,13	18,57	44,05	35,95	100,00
06. Purworejo	0,19	1,51	10,36	43,39	44,55	100,00
07. Wonosobo	0,45	5,01	42,18	35,38	16,98	100,00
08. Magelang	0,29	2,72	22,19	36,16	38,64	100,00
09. Boyolali	1,36	0,24	17,38	36,22	44,81	100,00
10. Klaten	0,95	1,25	6,65	29,13	62,02	100,00
11. Sukoharjo	0,81	0,16	4,96	31,75	62,34	100,00
12. Wonogiri	0,97	0,35	12,75	50,78	35,16	100,00
13. Karanganyar	0,00	0,25	10,84	42,20	46,71	100,00
14. Sragen	0,87	1,66	11,86	39,04	46,57	100,00
15. Grobogan	0,24	1,78	20,38	44,12	33,47	100,00
16. Blora	0,42	0,75	21,64	41,23	35,95	100,00
17. Rembang	1,35	0,49	24,11	47,28	26,78	100,00
18. Pati	1,19	0,73	12,71	43,81	41,57	100,00
19. Kudus	0,83	0,79	10,29	42,37	45,72	100,00
20. Jepara	0,19	0,50	19,77	47,19	32,34	100,00
21. Demak	0,09	0,89	17,19	42,05	39,78	100,00
22. Semarang	0,33	1,68	11,77	42,11	44,12	100,00
23. Temanggung	0,23	2,78	26,64	40,90	29,45	100,00
24. Kendal	0,87	2,35	20,34	41,88	34,56	100,00
25. Batang	0,32	2,49	33,27	38,16	25,76	100,00
26. Pekalongan	0,92	2,35	32,68	39,89	24,16	100,00
27. Pemalang	0,38	3,18	33,28	36,56	26,60	100,00
28. Tegal	0,88	3,96	28,93	35,93	30,30	100,00
29. Brebes	0,92	7,35	27,86	35,78	28,08	100,00
71. Kota Magelang	0,00	1,13	10,91	31,04	56,92	100,00
72. Kota Surakarta	0,15	1,24	5,19	27,35	66,06	100,00
73. Kota Salatiga	0,37	1,89	11,96	21,22	64,56	100,00
74. Kota Semarang	0,59	0,70	5,57	25,43	67,72	100,00
75. Kota Pekalongan	0,42	2,28	31,46	32,10	33,74	100,00
76. Kota Tegal	0,48	5,42	26,36	29,25	38,49	100,00
Jawa Tengah	0,57	2,13	19,01	38,77	39,53	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.6 Proporsi Pemuda Umur 16-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cilacap	63,72	64,89	64,26
02. Banyumas	60,90	58,39	59,59
03. Purbalingga	59,28	68,77	64,15
04. Banjarnegara	72,39	76,67	74,37
05. Kebumen	53,89	54,39	54,12
06. Purworejo	59,34	50,71	55,06
07. Wonosobo	67,47	74,56	70,73
08. Magelang	67,89	64,49	66,20
09. Boyolali	69,16	66,60	67,81
10. Klaten	59,89	55,21	57,56
11. Sukoharjo	51,94	44,73	48,15
12. Wonogiri	64,06	67,31	65,71
13. Karanganyar	49,75	48,48	49,14
14. Sragen	62,53	60,82	61,75
15. Grobogan	60,05	66,11	63,00
16. Blora	73,83	68,64	71,20
17. Rembang	63,87	74,15	68,84
18. Pati	61,44	60,85	61,16
19. Kudus	59,75	53,73	56,60
20. Jepara	66,65	72,33	69,47
21. Demak	67,29	61,35	64,37
22. Semarang	62,82	67,50	65,22
23. Temanggung	71,14	60,85	66,01
24. Kendal	61,84	56,27	59,21
25. Batang	64,30	63,74	64,03
26. Pekalongan	72,86	62,18	67,45
27. Pemasang	72,21	69,73	71,03
28. Tegal	71,21	64,34	67,73
29. Brebes	69,91	72,10	70,91
71. Kota Magelang	48,25	44,79	46,60
72. Kota Surakarta	45,92	33,78	39,83
73. Kota Salatiga	55,72	47,08	51,44
74. Kota Semarang	39,18	45,29	42,39
75. Kota Pekalongan	56,75	59,74	58,28
76. Kota Tegal	57,33	57,24	57,29
Jawa Tengah	62,46	61,24	61,86

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.7 Proporsi Pemuda yang Masih Bersekolah dan Mengakses Internet menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cilacap	76,09	82,08	78,73
02. Banyumas	83,96	91,33	87,96
03. Purbalingga	81,95	78,07	80,24
04. Banjarnegara	70,39	84,78	76,48
05. Kebumen	65,73	87,72	75,49
06. Purworejo	86,98	88,51	87,82
07. Wonosobo	73,93	74,07	73,99
08. Magelang	80,87	88,48	84,80
09. Boyolali	89,06	90,84	90,06
10. Klaten	94,77	91,97	93,30
11. Sukoharjo	89,92	94,40	92,44
12. Wonogiri	84,48	81,78	83,20
13. Karanganyar	83,46	94,42	88,63
14. Sragen	80,53	85,97	83,14
15. Grobogan	63,33	78,29	69,98
16. Blora	88,70	85,83	87,13
17. Rembang	74,34	74,01	74,20
18. Pati	86,74	84,92	85,90
19. Kudus	89,63	89,32	89,46
20. Jepara	89,12	77,66	84,00
21. Demak	70,47	71,63	71,08
22. Semarang	86,93	79,94	83,55
23. Temanggung	82,16	88,21	85,65
24. Kendal	82,14	92,76	87,47
25. Batang	80,56	90,40	85,26
26. Pekalongan	75,02	81,25	78,74
27. Pemasang	71,75	82,44	77,01
28. Tegal	85,61	86,84	86,30
29. Brebes	78,44	90,26	83,60
71. Kota Magelang	89,12	88,92	89,02
72. Kota Surakarta	94,43	90,97	92,53
73. Kota Salatiga	91,89	96,34	94,25
74. Kota Semarang	92,81	95,71	94,22
75. Kota Pekalongan	78,83	83,68	81,25
76. Kota Tegal	90,22	85,92	88,22
Jawa Tengah	82,38	87,05	84,70

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.1.1 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Perkotaan
	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)
01. Cilacap	18,68	18,67	18,67
02. Banyumas	21,36	26,49	23,92
03. Purbalingga	17,95	22,17	20,12
04. Banjarnegara	14,56	14,89	14,71
05. Kebumen	16,81	20,37	18,55
06. Purworejo	16,05	17,84	16,95
07. Wonosobo	52,32	39,20	45,69
08. Magelang	16,97	17,70	17,33
09. Boyolali	20,64	21,51	21,08
10. Klaten	18,71	21,49	20,10
11. Sukoharjo	17,81	19,52	18,70
12. Wonogiri	17,14	12,77	14,88
13. Karanganyar	20,23	23,67	21,81
14. Sragen	17,02	17,34	17,18
15. Grobogan	13,21	12,48	12,83
16. Blora	24,12	35,19	29,55
17. Rembang	20,59	23,31	21,90
18. Pati	13,45	14,53	14,01
19. Kudus	17,39	23,79	20,71
20. Jepara	13,75	18,06	15,77
21. Demak	11,67	17,47	14,58
22. Semarang	34,74	27,96	31,36
23. Temanggung	24,48	31,88	28,15
24. Kendal	14,36	16,24	15,23
25. Batang	13,93	19,54	16,60
26. Pekalongan	22,70	25,84	24,28
27. Pemalang	22,17	27,20	24,73
28. Tegal	11,70	13,02	12,34
29. Brebes	24,24	31,66	27,83
71. Kota Magelang	23,17	28,80	25,90
72. Kota Surakarta	29,07	35,46	32,23
73. Kota Salatiga	30,10	27,35	28,70
74. Kota Semarang	20,85	20,49	20,67
75. Kota Pekalongan	13,22	16,22	14,71
76. Kota Tegal	22,88	26,80	24,72
Jawa Tengah	19,62	22,21	20,90

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.1.2 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Perdesaan
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin
	Laki-laki	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cilacap	24,95	21,43	23,26
02. Banyumas	33,10	31,54	32,34
03. Purbalingga	22,97	21,53	22,23
04. Banjarnegara	15,23	19,79	17,43
05. Kebumen	14,29	17,56	15,85
06. Purworejo	17,84	14,19	16,03
07. Wonosobo	49,52	49,14	49,34
08. Magelang	20,44	19,38	19,94
09. Boyolali	31,10	21,10	26,01
10. Klaten	19,84	36,65	27,75
11. Sukoharjo	8,22	23,79	15,52
12. Wonogiri	10,94	14,03	12,56
13. Karanganyar	17,69	13,91	15,76
14. Sragen	14,91	25,99	20,21
15. Grobogan	21,29	31,33	26,13
16. Blora	21,02	25,05	23,11
17. Rembang	12,90	22,32	17,56
18. Pati	19,45	19,59	19,52
19. Kudus	28,98	26,42	27,74
20. Jepara	14,80	15,30	15,06
21. Demak	12,45	16,83	14,59
22. Semarang	24,81	22,16	23,43
23. Temanggung	18,37	16,57	17,49
24. Kendal	20,55	35,22	27,40
25. Batang	15,48	13,42	14,50
26. Pekalongan	17,93	22,10	20,09
27. Pemalang	22,66	16,52	19,59
28. Tegal	15,41	22,31	18,93
29. Brebes	19,56	25,34	22,26
71. Kota Magelang	-	-	-
72. Kota Surakarta	-	-	-
73. Kota Salatiga	-	-	-
74. Kota Semarang	22,23	8,94	15,63
75. Kota Pekalongan	0,00	17,61	8,61
76. Kota Tegal	-	-	-
Jawa Tengah	20,64	22,70	21,66

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.1.3 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
	(1)	(2)	
01. Cilacap	22,70	20,44	21,62
02. Banyumas	27,04	28,90	27,96
03. Purbalingga	21,33	21,74	21,54
04. Banjarnegara	15,06	18,60	16,75
05. Kebumen	14,96	18,34	16,58
06. Purworejo	17,25	15,41	16,33
07. Wonosobo	50,20	46,42	48,41
08. Magelang	19,46	18,89	19,19
09. Boyolali	27,53	21,24	24,34
10. Klaten	19,08	25,96	22,45
11. Sukoharjo	15,43	20,41	17,98
12. Wonogiri	12,40	13,74	13,10
13. Karanganyar	19,11	18,87	18,99
14. Sragen	15,63	22,96	19,16
15. Grobogan	19,92	27,77	23,75
16. Blora	21,81	27,43	24,69
17. Rembang	15,25	22,62	18,87
18. Pati	17,42	17,79	17,60
19. Kudus	20,00	24,32	22,20
20. Jepara	14,12	16,94	15,50
21. Demak	12,14	17,10	14,59
22. Semarang	29,08	24,53	26,76
23. Temanggung	19,98	20,71	20,34
24. Kendal	17,40	25,62	21,24
25. Batang	14,84	15,92	15,36
26. Pekalongan	20,48	24,05	22,30
27. Pemasaran	22,41	22,16	22,28
28. Tegal	13,15	16,88	15,00
29. Brebes	21,67	28,30	24,82
71. Kota Magelang	23,17	28,80	25,90
72. Kota Surakarta	29,07	35,46	32,23
73. Kota Salatiga	30,10	27,35	28,70
74. Kota Semarang	20,87	20,33	20,60
75. Kota Pekalongan	12,92	16,25	14,58
76. Kota Tegal	22,88	26,80	24,72
Jawa Tengah	20,15	22,46	21,29

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.2.1 Angka Kesakitan Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Perkotaan
	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)
01. Cilacap	10,07	9,05	9,58
02. Banyumas	9,14	11,40	10,26
03. Purbalingga	12,42	9,86	11,11
04. Banjarnegara	6,46	1,45	4,14
05. Kebumen	7,14	8,49	7,80
06. Purworejo	8,60	2,66	5,61
07. Wonosobo	17,53	8,49	12,96
08. Magelang	8,57	5,88	7,26
09. Boyolali	12,84	11,23	12,03
10. Klaten	11,86	9,18	10,52
11. Sukoharjo	7,14	7,44	7,30
12. Wonogiri	2,27	3,49	2,90
13. Karanganyar	6,87	12,44	9,43
14. Sragen	8,52	5,76	7,18
15. Grobogan	3,64	5,33	4,51
16. Blora	8,73	15,38	11,99
17. Rembang	11,91	14,58	13,20
18. Pati	6,04	7,53	6,81
19. Kudus	7,38	8,18	7,79
20. Jepara	7,12	4,88	6,07
21. Demak	5,07	6,29	5,68
22. Semarang	21,79	15,91	18,86
23. Temanggung	9,29	24,05	16,61
24. Kendal	8,78	6,90	7,91
25. Batang	6,62	8,76	7,64
26. Pekalongan	6,59	10,62	8,61
27. Pemalang	14,03	14,14	14,09
28. Tegal	3,91	2,89	3,41
29. Brebes	11,14	15,30	13,15
71. Kota Magelang	8,58	13,36	10,90
72. Kota Surakarta	8,92	7,94	8,44
73. Kota Salatiga	9,90	14,75	12,37
74. Kota Semarang	9,03	6,35	7,68
75. Kota Pekalongan	3,74	6,42	5,08
76. Kota Tegal	10,85	9,08	10,02
Jawa Tengah	8,91	8,84	8,88

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.2.2 Angka Kesakitan Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Perdesaan
	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)
01. Cilacap	9,02	11,32	10,13
02. Banyumas	15,28	11,71	13,52
03. Purbalingga	7,79	9,00	8,41
04. Banjarnegara	7,65	10,42	8,98
05. Kebumen	7,70	7,51	7,61
06. Purworejo	11,27	7,66	9,48
07. Wonosobo	18,07	17,64	17,87
08. Magelang	6,17	10,01	8,00
09. Boyolali	14,48	9,96	12,18
10. Klaten	6,71	14,88	10,56
11. Sukoharjo	8,08	1,65	5,07
12. Wonogiri	3,17	6,18	4,75
13. Karanganyar	8,59	5,63	7,09
14. Sragen	8,35	6,05	7,25
15. Grobogan	7,44	12,03	9,65
16. Blora	12,03	13,51	12,80
17. Rembang	7,90	9,52	8,70
18. Pati	13,40	13,31	13,35
19. Kudus	7,88	13,80	10,73
20. Jepara	5,89	7,67	6,83
21. Demak	6,90	9,06	7,95
22. Semarang	16,88	15,84	16,34
23. Temanggung	6,66	7,04	6,85
24. Kendal	7,04	9,47	8,18
25. Batang	7,68	6,52	7,13
26. Pekalongan	12,33	13,67	13,02
27. Pemalang	11,11	9,86	10,48
28. Tegal	10,00	10,13	10,07
29. Brebes	10,28	15,85	12,88
71. Kota Magelang	-	-	-
72. Kota Surakarta	-	-	-
73. Kota Salatiga	-	-	-
74. Kota Semarang	0,00	1,20	,60
75. Kota Pekalongan	0,00	4,98	2,44
76. Kota Tegal	-	-	-
Jawa Tengah	9,60	10,62	10,10

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.2.3 Angka Kesakitan Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
	(1)	(2)	
01. Cilacap	9,40	10,51	9,93
02. Banyumas	12,11	11,55	11,83
03. Purbalingga	9,30	9,28	9,29
04. Banjarnegara	7,35	8,24	7,77
05. Kebumen	7,55	7,78	7,66
06. Purworejo	10,40	6,00	8,20
07. Wonosobo	17,94	15,14	16,61
08. Magelang	6,85	8,80	7,78
09. Boyolali	13,92	10,38	12,13
10. Klaten	10,22	10,86	10,53
11. Sukoharjo	7,38	6,23	6,79
12. Wonogiri	2,96	5,56	4,32
13. Karanganyar	7,63	9,09	8,34
14. Sragen	8,41	5,95	7,22
15. Grobogan	6,80	10,76	8,73
16. Blora	11,19	13,95	12,60
17. Rembang	9,12	11,02	10,06
18. Pati	10,90	11,25	11,08
19. Kudus	7,49	9,31	8,42
20. Jepara	6,69	6,02	6,36
21. Demak	6,17	7,91	7,03
22. Semarang	18,99	15,87	17,40
23. Temanggung	7,35	11,63	9,45
24. Kendal	7,93	8,17	8,04
25. Batang	7,24	7,44	7,34
26. Pekalongan	9,26	12,08	10,70
27. Pemalang	12,63	12,12	12,37
28. Tegal	6,29	5,90	6,09
29. Brebes	10,67	15,60	13,01
71. Kota Magelang	8,58	13,36	10,90
72. Kota Surakarta	8,92	7,94	8,44
73. Kota Salatiga	9,90	14,75	12,37
74. Kota Semarang	8,89	6,27	7,57
75. Kota Pekalongan	3,66	6,39	5,02
76. Kota Tegal	10,85	9,08	10,02
Jawa Tengah	9,26	9,75	9,50

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.3.1 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Sakit, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Lamanya Sakit			Perkotaan
	1-3	4-7	8+	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cilacap	70,37	18,52	11,11	100,00
02. Banyumas	47,22	36,11	16,67	100,00
03. Purbalingga	54,84	29,03	16,13	100,00
04. Banjarnegara	33,33	50,00	16,67	100,00
05. Kebumen	58,33	33,33	8,33	100,00
06. Purworejo	66,67	0,00	33,33	100,00
07. Wonosobo	60,87	21,74	17,39	100,00
08. Magelang	57,14	42,86	0,00	100,00
09. Boyolali	78,26	17,39	4,35	100,00
10. Klaten	51,22	39,02	9,76	100,00
11. Sukoharjo	58,06	41,94	0,00	100,00
12. Wonogiri	75,00	25,00	0,00	100,00
13. Karanganyar	66,67	30,30	3,03	100,00
14. Sragen	81,25	18,75	0,00	100,00
15. Grobogan	50,00	50,00	0,00	100,00
16. Blora	78,57	21,43	0,00	100,00
17. Rembang	50,00	38,89	11,11	100,00
18. Pati	46,67	33,33	20,00	100,00
19. Kudus	71,43	23,81	4,76	100,00
20. Jepara	47,83	47,83	4,35	100,00
21. Demak	78,26	8,70	13,04	100,00
22. Semarang	54,72	35,85	9,43	100,00
23. Temanggung	54,17	41,67	4,17	100,00
24. Kendal	67,74	25,81	6,45	100,00
25. Batang	68,18	18,18	13,64	100,00
26. Pekalongan	56,25	37,50	6,25	100,00
27. Pemalang	62,75	35,29	1,96	100,00
28. Tegal	64,29	21,43	14,29	100,00
29. Brebes	58,33	27,08	14,58	100,00
71. Kota Magelang	51,72	37,93	10,34	100,00
72. Kota Surakarta	80,49	12,20	7,32	100,00
73. Kota Salatiga	68,18	25,00	6,82	100,00
74. Kota Semarang	69,23	19,23	11,54	100,00
75. Kota Pekalongan	60,87	30,43	8,70	100,00
76. Kota Tegal	60,00	31,43	8,57	100,00
Jawa Tengah	62,14	29,16	8,70	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.3.2 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Sakit, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Lamanya Sakit			Perdesaan
	1-3	4-7	8+	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cilacap	63,16	21,05	15,79	100,00
02. Banyumas	58,06	38,71	3,23	100,00
03. Purbalingga	58,06	22,58	19,35	100,00
04. Banjarnegara	52,78	38,89	8,33	100,00
05. Kebumen	53,57	39,29	7,14	100,00
06. Purworejo	56,52	26,09	17,39	100,00
07. Wonosobo	54,84	29,03	16,13	100,00
08. Magelang	57,14	32,14	10,71	100,00
09. Boyolali	66,67	25,00	8,33	100,00
10. Klaten	66,67	22,22	11,11	100,00
11. Sukoharjo	75,00	25,00	0,00	100,00
12. Wonogiri	37,50	25,00	37,50	100,00
13. Karanganyar	70,59	11,76	17,65	100,00
14. Sragen	50,00	50,00	0,00	100,00
15. Grobogan	72,50	25,00	2,50	100,00
16. Blora	74,36	20,51	5,13	100,00
17. Rembang	45,45	30,30	24,24	100,00
18. Pati	62,79	27,91	9,30	100,00
19. Kudus	50,00	42,86	7,14	100,00
20. Jepara	69,23	23,08	7,69	100,00
21. Demak	38,46	57,69	3,85	100,00
22. Semarang	54,90	31,37	13,73	100,00
23. Temanggung	52,17	30,43	17,39	100,00
24. Kendal	65,22	30,43	4,35	100,00
25. Batang	58,33	37,50	4,17	100,00
26. Pekalongan	43,33	40,00	16,67	100,00
27. Pemalang	62,86	34,29	2,86	100,00
28. Tegal	66,67	22,22	11,11	100,00
29. Brebes	48,89	46,67	4,44	100,00
71. Kota Magelang	-	-	-	-
72. Kota Surakarta	-	-	-	-
73. Kota Salatiga	-	-	-	-
74. Kota Semarang	100,00	0,00	0,00	100,00
75. Kota Pekalongan	50,00	50,00	0,00	100,00
76. Kota Tegal	-	-	-	-
Jawa Tengah	57,71	31,66	10,63	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.3.3 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Sakit, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Perkotaan + Perdesaan			Total
	Lamanya Sakit			
	1-3	4-7	8+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Cilacap	66,15	20,00	13,85	100,00
02. Banyumas	52,24	37,31	10,45	100,00
03. Purbalingga	56,45	25,81	17,74	100,00
04. Banjarnegara	50,00	40,48	9,52	100,00
05. Kebumen	55,00	37,50	7,50	100,00
06. Purworejo	58,62	20,69	20,69	100,00
07. Wonosobo	56,47	27,06	16,47	100,00
08. Magelang	57,14	35,71	7,14	100,00
09. Boyolali	71,19	22,03	6,78	100,00
10. Klaten	54,00	36,00	10,00	100,00
11. Sukoharjo	60,00	40,00	0,00	100,00
12. Wonogiri	45,00	25,00	30,00	100,00
13. Karanganyar	68,00	24,00	8,00	100,00
14. Sragen	64,71	35,29	0,00	100,00
15. Grobogan	69,57	28,26	2,17	100,00
16. Blora	75,47	20,75	3,77	100,00
17. Rembang	47,06	33,33	19,61	100,00
18. Pati	58,62	29,31	12,07	100,00
19. Kudus	66,07	28,57	5,36	100,00
20. Jepara	55,56	38,89	5,56	100,00
21. Demak	57,14	34,69	8,16	100,00
22. Semarang	54,81	33,65	11,54	100,00
23. Temanggung	53,19	36,17	10,64	100,00
24. Kendal	66,67	27,78	5,56	100,00
25. Batang	63,04	28,26	8,70	100,00
26. Pekalongan	50,00	38,71	11,29	100,00
27. Pemasang	62,79	34,88	2,33	100,00
28. Tegal	65,63	21,88	12,50	100,00
29. Brebes	53,76	36,56	9,68	100,00
71. Kota Magelang	51,72	37,93	10,34	100,00
72. Kota Surakarta	80,49	12,20	7,32	100,00
73. Kota Salatiga	68,18	25,00	6,82	100,00
74. Kota Semarang	69,81	18,87	11,32	100,00
75. Kota Pekalongan	60,00	32,00	8,00	100,00
76. Kota Tegal	60,00	31,43	8,57	100,00
Jawa Tengah	60,06	30,34	9,61	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.4.1 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Tempat Berobat Jalan					Total
	Rumah Sakit	Praktek dokter/ Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskes- mas	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Cilacap	5,88	46,56	12,70	28,90	5,96	100,00
02. Banyumas	20,00	34,47	31,52	20,60	0,00	100,00
03. Purbalingga	17,39	53,55	6,38	22,20	2,55	100,00
04. Banjarnegara	0,00	57,14	6,15	26,38	10,33	100,00
05. Kebumen	12,49	37,16	0,00	43,98	15,75	100,00
06. Purworejo	27,94	51,27	0,00	31,89	0,00	100,00
07. Wonosobo	11,50	50,02	2,13	25,88	20,14	100,00
08. Magelang	24,72	51,68	5,21	27,35	0,00	100,00
09. Boyolali	8,25	60,71	9,02	22,03	0,00	100,00
10. Klaten	42,43	31,19	9,29	23,50	0,00	100,00
11. Sukoharjo	8,23	45,63	28,50	24,06	8,68	100,00
12. Wonogiri	0,00	32,30	0,00	67,70	0,00	100,00
13. Karanganyar	21,02	25,83	25,35	20,86	15,49	100,00
14. Sragen	10,51	64,76	0,00	29,59	0,00	100,00
15. Grobogan	0,00	75,91	24,09	9,40	0,00	100,00
16. Blora	21,53	42,13	13,24	16,08	7,03	100,00
17. Rembang	14,29	54,55	9,97	31,65	3,29	100,00
18. Pati	0,00	77,94	3,07	11,67	12,14	100,00
19. Kudus	7,10	53,97	20,08	18,85	0,00	100,00
20. Jepara	13,78	63,30	17,24	2,93	2,75	100,00
21. Demak	13,24	50,60	8,11	28,04	3,60	100,00
22. Semarang	18,06	52,93	19,20	7,41	5,45	100,00
23. Temanggung	28,80	47,69	2,77	20,74	7,66	100,00
24. Kendal	26,33	49,06	5,95	25,90	0,00	100,00
25. Batang	7,70	34,58	17,30	40,41	0,00	100,00
26. Pekalongan	4,92	39,37	9,89	37,03	15,03	100,00
27. Pemalang	0,00	63,74	9,92	25,37	0,98	100,00
28. Tegal	17,48	54,61	18,72	9,18	0,00	100,00
29. Brebes	14,59	56,71	8,27	28,84	0,00	100,00
71. Kota Magelang	43,23	15,95	2,22	40,42	0,00	100,00
72. Kota Surakarta	12,83	32,09	28,26	24,51	3,79	100,00
73. Kota Salatiga	12,26	31,22	15,83	40,85	2,36	100,00
74. Kota Semarang	13,34	52,28	23,43	7,74	3,21	100,00
75. Kota Pekalongan	10,71	11,55	0,00	72,39	5,35	100,00
76. Kota Tegal	13,83	26,18	15,31	48,29	3,14	100,00
Jawa Tengah	14,68	46,92	15,46	23,36	3,92	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.4.2 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Tempat Berobat Jalan					Total
	Rumah Sakit	Praktek dokter/ Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskes- mas	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Cilacap	17,87	32,93	27,83	26,02	0,00	100,00
02. Banyumas	17,26	36,24	16,07	30,74	1,93	100,00
03. Purbalingga	5,47	43,38	2,83	34,84	16,20	100,00
04. Banjarnegara	16,37	44,52	4,48	25,87	11,37	100,00
05. Kebumen	12,13	50,91	0,00	42,94	0,00	100,00
06. Purworejo	4,52	63,18	0,00	26,83	11,43	100,00
07. Wonosobo	4,65	46,82	4,97	33,51	10,06	100,00
08. Magelang	3,91	65,80	11,44	16,86	1,99	100,00
09. Boyolali	18,25	55,73	4,21	20,05	1,75	100,00
10. Klaten	9,48	69,27	6,76	14,50	0,00	100,00
11. Sukoharjo	0,00	10,89	0,00	90,62	29,70	100,00
12. Wonogiri	50,03	37,12	5,58	15,42	0,00	100,00
13. Karanganyar	14,71	38,54	6,28	40,46	0,00	100,00
14. Sragen	7,09	66,23	13,13	15,70	3,15	100,00
15. Grobogan	3,58	50,27	10,08	30,73	6,18	100,00
16. Blora	15,65	62,53	3,42	11,29	7,12	100,00
17. Rembang	17,30	37,80	7,44	38,35	2,70	100,00
18. P a t i	10,10	67,88	6,34	13,28	4,36	100,00
19. Kudus	0,00	47,85	5,02	40,17	6,96	100,00
20. Jepara	8,57	56,74	22,55	17,88	0,00	100,00
21. Demak	11,05	65,46	0,00	22,84	4,99	100,00
22. Semarang	11,66	47,35	10,31	29,35	3,49	100,00
23. Temanggung	9,17	66,76	11,62	12,46	0,00	100,00
24. Kendal	7,56	64,75	12,69	15,00	5,18	100,00
25. Batang	6,56	61,06	5,64	21,89	4,85	100,00
26. Pekalongan	3,38	68,22	6,17	25,75	3,52	100,00
27. Pemalang	18,36	59,46	6,44	14,12	1,63	100,00
28. Tegal	0,00	59,66	9,86	17,74	17,13	100,00
29. Brebes	18,53	54,05	7,41	16,70	13,34	100,00
71. Kota Magelang	-	-	-	-	-	-
72. Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-
73. Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-
74. Kota Semarang	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75. Kota Pekalongan	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
76. Kota Tegal	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	10,83	53,31	8,72	24,91	5,68	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.4.3 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Tempat Berobat Jalan					Total
	Rumah Sakit	Praktek dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskesmas	Lainnya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
01. Cilacap	13,89	37,45	22,81	26,98	1,98	100,00
02. Banyumas	18,43	35,48	22,69	26,40	1,10	100,00
03. Purbalingga	9,70	46,99	4,09	30,35	11,36	100,00
04. Banjarnegara	13,88	46,44	4,73	25,95	11,21	100,00
05. Kebumen	12,22	47,30	0,00	43,21	4,13	100,00
06. Purworejo	14,45	58,13	0,00	28,98	6,59	100,00
07. Wonosobo	6,86	47,85	4,05	31,05	13,31	100,00
08. Magelang	9,11	62,27	9,89	19,48	1,49	100,00
09. Boyolali	14,69	57,51	5,92	20,75	1,13	100,00
10. Klaten	30,18	45,34	8,35	20,16	0,00	100,00
11. Sukoharjo	6,10	36,66	21,14	41,25	14,11	100,00
12. Wonogiri	42,48	36,39	4,74	23,31	0,00	100,00
13. Karanganyar	19,16	29,58	19,73	26,64	10,93	100,00
14. Sragen	7,85	65,91	10,21	18,79	2,45	100,00
15. Grobogan	3,33	52,08	11,07	29,22	5,74	100,00
16. Blora	17,21	57,08	6,04	12,57	7,09	100,00
17. Rembang	16,03	44,89	8,51	35,52	2,95	100,00
18. Pati	7,43	70,54	5,48	12,85	6,42	100,00
19. Kudus	4,89	52,06	15,39	25,49	2,17	100,00
20. Jepara	11,84	60,86	19,22	8,49	1,73	100,00
21. Demak	11,83	60,18	2,89	24,69	4,49	100,00
22. Semarang	14,16	49,53	13,79	20,77	4,26	100,00
23. Temanggung	15,86	60,26	8,60	15,28	2,61	100,00
24. Kendal	16,05	57,65	9,64	19,93	2,84	100,00
25. Batang	7,04	50,08	10,48	29,57	2,84	100,00
26. Pekalongan	4,04	55,82	7,77	30,60	8,47	100,00
27. Pemalang	7,93	61,89	8,42	20,51	1,26	100,00
28. Tegal	6,06	57,91	12,93	14,77	11,20	100,00
29. Brebes	16,76	55,24	7,79	22,15	7,35	100,00
71. Kota Magelang	43,23	15,95	2,22	40,42	0,00	100,00
72. Kota Surakarta	12,83	32,09	28,26	24,51	3,79	100,00
73. Kota Salatiga	12,26	31,22	15,83	40,85	2,36	100,00
74. Kota Semarang	13,16	52,89	23,13	7,64	3,17	100,00
75. Kota Pekalongan	10,57	12,70	0,00	71,45	5,28	100,00
76. Kota Tegal	13,83	26,18	15,31	48,29	3,14	100,00
Jawa Tengah	12,63	50,32	11,87	24,18	4,85	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.5.1 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi dalam Program KB, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Ber-KB			Perkotaan
	Pernah ber-KB	Sedang ber-KB	Tidak Pernah ber-KB	Total
	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Cilacap	12,06	47,61	40,33	100,00
02. Banyumas	8,81	52,69	38,50	100,00
03. Purbalingga	3,03	52,86	44,11	100,00
04. Banjarnegara	9,54	60,18	30,29	100,00
05. Kebumen	9,55	44,94	45,51	100,00
06. Purworejo	16,91	34,54	48,55	100,00
07. Wonosobo	17,86	56,53	25,61	100,00
08. Magelang	5,33	49,83	44,84	100,00
09. Boyolali	16,75	52,22	31,04	100,00
10. Klaten	14,96	44,43	40,61	100,00
11. Sukoharjo	8,13	42,93	48,94	100,00
12. Wonogiri	9,42	50,50	40,08	100,00
13. Karanganyar	10,20	51,68	38,12	100,00
14. Sragen	7,71	61,83	30,46	100,00
15. Grobogan	7,08	51,88	41,04	100,00
16. Blora	7,43	69,79	22,78	100,00
17. Rembang	10,75	52,91	36,34	100,00
18. Pati	2,73	57,08	40,19	100,00
19. Kudus	11,02	49,15	39,82	100,00
20. Jepara	10,35	56,38	33,27	100,00
21. Demak	8,14	61,24	30,61	100,00
22. Semarang	12,27	58,45	29,28	100,00
23. Temanggung	7,40	55,69	36,91	100,00
24. Kendal	12,38	53,95	33,66	100,00
25. Batang	11,51	54,96	33,54	100,00
26. Pekalongan	18,09	40,67	41,23	100,00
27. Pemalang	10,60	46,29	43,11	100,00
28. Tegal	18,89	47,36	33,74	100,00
29. Brebes	7,98	66,88	25,15	100,00
71. Kota Magelang	1,38	56,55	42,07	100,00
72. Kota Surakarta	11,17	40,85	47,98	100,00
73. Kota Salatiga	10,54	42,81	46,65	100,00
74. Kota Semarang	3,74	54,16	42,11	100,00
75. Kota Pekalongan	6,32	42,85	50,83	100,00
76. Kota Tegal	13,22	47,92	38,86	100,00
Jawa Tengah	9,82	52,26	37,92	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.5.2 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi dalam Program KB, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Ber-KB			Perdesaan
	Pernah ber-KB	Sedang ber-KB	Tidak Pernah ber-KB	Total
	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Cilacap	10,67	52,91	36,43	100,00
02. Banyumas	6,84	68,35	24,80	100,00
03. Purbalingga	10,83	60,55	28,62	100,00
04. Banjarnegara	7,96	66,11	25,93	100,00
05. Kebumen	4,68	62,19	33,12	100,00
06. Purworejo	7,12	56,54	36,34	100,00
07. Wonosobo	10,33	67,15	22,52	100,00
08. Magelang	7,28	50,02	42,69	100,00
09. Boyolali	2,32	71,87	25,81	100,00
10. Klaten	3,49	52,83	43,67	100,00
11. Sukoharjo	13,78	68,89	17,33	100,00
12. Wonogiri	11,23	54,37	34,40	100,00
13. Karanganyar	16,91	51,79	31,30	100,00
14. Sragen	10,80	57,94	31,26	100,00
15. Grobogan	4,22	65,82	29,96	100,00
16. Blora	6,68	68,61	24,71	100,00
17. Rembang	4,16	74,65	21,20	100,00
18. Pati	5,29	57,27	37,44	100,00
19. Kudus	19,77	24,32	55,90	100,00
20. Jepara	9,66	66,91	23,43	100,00
21. Demak	4,65	71,04	24,31	100,00
22. Semarang	11,79	55,65	32,56	100,00
23. Temanggung	12,23	59,80	27,97	100,00
24. Kendal	3,91	65,34	30,75	100,00
25. Batang	8,14	62,27	29,59	100,00
26. Pekalongan	9,15	56,52	34,33	100,00
27. Pemalang	10,73	58,68	30,59	100,00
28. Tegal	7,62	69,84	22,54	100,00
29. Brebes	5,68	60,44	33,88	100,00
71. Kota Magelang	-	-	-	-
72. Kota Surakarta	-	-	-	-
73. Kota Salatiga	-	-	-	-
74. Kota Semarang	16,57	34,80	48,63	100,00
75. Kota Pekalongan	6,11	60,79	33,10	100,00
76. Kota Tegal	-	-	-	-
Jawa Tengah	7,94	61,57	30,49	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.5.3 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi dalam Program KB, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Ber-KB			Total
	Pernah ber-KB	Sedang ber-KB	Tidak Pernah ber-KB	
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Cilacap	11,11	51,23	37,66	100,00
02. Banyumas	7,76	61,09	31,15	100,00
03. Purbalingga	8,33	58,08	33,59	100,00
04. Banjarnegara	8,29	64,85	26,86	100,00
05. Kebumen	5,92	57,81	36,27	100,00
06. Purworejo	9,74	50,65	39,61	100,00
07. Wonosobo	12,08	64,68	23,24	100,00
08. Magelang	6,76	49,97	43,27	100,00
09. Boyolali	6,51	66,16	27,33	100,00
10. Klaten	11,14	47,23	41,63	100,00
11. Sukoharjo	9,32	48,40	42,28	100,00
12. Wonogiri	10,85	53,54	35,61	100,00
13. Karanganyar	13,97	51,74	34,29	100,00
14. Sragen	9,84	59,14	31,01	100,00
15. Grobogan	4,64	63,75	31,60	100,00
16. Blora	6,84	68,86	24,30	100,00
17. Rembang	5,91	68,87	25,22	100,00
18. Pati	4,47	57,21	38,32	100,00
19. Kudus	12,97	43,63	43,40	100,00
20. Jepara	10,05	61,04	28,92	100,00
21. Demak	5,91	67,51	26,58	100,00
22. Semarang	11,95	56,61	31,43	100,00
23. Temanggung	11,27	58,98	29,74	100,00
24. Kendal	7,56	60,43	32,01	100,00
25. Batang	9,30	59,74	30,95	100,00
26. Pekalongan	13,51	48,79	37,69	100,00
27. Pemasang	10,67	52,61	36,73	100,00
28. Tegal	13,22	58,67	28,11	100,00
29. Brebes	6,62	63,10	30,28	100,00
71. Kota Magelang	1,38	56,55	42,07	100,00
72. Kota Surakarta	11,17	40,85	47,98	100,00
73. Kota Salatiga	10,54	42,81	46,65	100,00
74. Kota Semarang	4,00	53,76	42,24	100,00
75. Kota Pekalongan	6,31	43,38	50,30	100,00
76. Kota Tegal	13,22	47,92	38,86	100,00
Jawa Tengah	8,72	57,69	33,59	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.6.1

**Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut
Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB yang Digunakan, Jawa Tengah 2016**

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB yang Digunakan					Perkotaan	Jumlah
	AKDR/IUD/ Spiral	Suntikan KB	Susuk KB/ Implanon/	Pil KB	Tradisional dan lainnya		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
01, Cilacap	19,63	64,53	3,18	4,92	7,74	100,00	
02, Banyumas	26,80	59,56	6,05	5,07	2,53	100,00	
03, Purbalingga	12,20	64,45	15,88	7,47	0,00	100,00	
04, Banjarnegara	6,15	61,26	2,02	20,97	9,60	100,00	
05, Kebumen	10,39	47,69	19,56	12,45	9,91	100,00	
06, Purworejo	22,48	62,20	15,32	0,00	0,00	100,00	
07, Wonosobo	18,10	61,78	10,61	5,55	3,96	100,00	
08, Magelang	12,56	53,46	9,37	13,20	11,40	100,00	
09, Boyolali	16,35	74,66	3,27	5,72	0,00	100,00	
10, Klaten	8,92	70,65	9,95	6,13	4,36	100,00	
11, Sukoharjo	3,23	84,83	2,02	4,54	5,38	100,00	
12, Wonogiri	14,03	31,03	10,80	24,32	19,82	100,00	
13, Karanganyar	12,99	75,86	0,00	8,08	3,07	100,00	
14, Sragen	17,88	82,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
15, Grobogan	6,10	76,20	0,00	11,16	6,54	100,00	
16, Blora	0,00	86,83	4,93	8,24	0,00	100,00	
17, Rembang	0,00	70,58	0,00	24,80	4,61	100,00	
18, Pati	10,02	67,92	3,30	18,76	0,00	100,00	
19, Kudus	1,35	76,87	2,17	19,62	0,00	100,00	
20, Jepara	0,00	92,91	1,51	4,19	1,39	100,00	
21, Demak	7,43	77,53	4,11	7,80	3,12	100,00	
22, Semarang	9,28	64,63	8,53	10,58	6,98	100,00	
23, Temanggung	13,85	45,54	33,17	0,00	7,44	100,00	
24, Kendal	1,78	84,53	5,20	8,50	0,00	100,00	
25, Batang	1,55	72,92	4,19	10,54	10,79	100,00	
26, Pekalongan	6,40	79,25	3,54	8,79	2,03	100,00	
27, Pemalang	10,54	77,56	3,61	6,59	1,71	100,00	
28, Tegal	13,44	71,94	4,76	6,13	3,73	100,00	
29, Brebes	5,59	74,91	5,84	9,91	3,75	100,00	
71, Kota Magelang	28,04	43,75	13,47	8,73	6,01	100,00	
72, Kota Surakarta	39,70	37,65	0,00	12,90	9,75	100,00	
73, Kota Salatiga	15,11	50,82	20,37	10,06	3,64	100,00	
74, Kota Semarang	17,76	52,93	8,04	8,13	13,14	100,00	
75, Kota Pekalongan	10,89	79,28	2,08	7,75	0,00	100,00	
76, Kota Tegal	2,92	72,48	17,86	6,74	0,00	100,00	
Jawa Tengah	10,70	69,66	5,88	9,03	4,73	100,00	

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.6.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB yang Digunakan, Jawa Tengah 2016

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB yang Digunakan					Perdesaan	Jumlah
	AKDR/IUD/ Spiral	Suntikan KB	Susuk KB/ Implanon/	Pil KB	Tradisional dan lainnya		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
01. Cilacap	12,27	62,57	9,97	15,20	0,00	100,00	
02. Banyumas	16,82	60,10	10,37	10,66	2,05	100,00	
03. Purbalingga	14,51	67,61	4,74	13,14	0,00	100,00	
04. Banjarnegara	5,45	77,42	6,30	9,75	1,09	100,00	
05. Kebumen	0,83	72,45	15,11	6,44	5,16	100,00	
06. Purworejo	13,55	44,94	26,71	9,50	5,31	100,00	
07. Wonosobo	0,00	73,16	20,70	6,14	0,00	100,00	
08. Magelang	10,35	58,07	24,98	6,60	0,00	100,00	
09. Boyolali	7,31	76,77	12,54	3,39	0,00	100,00	
10. Klaten	0,00	85,21	14,79	0,00	0,00	100,00	
11. Sukoharjo	0,00	79,81	0,00	12,59	7,60	100,00	
12. Wonogiri	7,80	65,24	5,40	21,55	0,00	100,00	
13. Karanganyar	24,23	56,64	9,65	9,48	0,00	100,00	
14. Sragen	11,97	70,84	2,85	14,35	0,00	100,00	
15. Grobogan	0,00	74,38	5,19	16,45	3,98	100,00	
16. Blora	2,50	76,98	4,08	10,67	5,76	100,00	
17. Rembang	2,85	88,47	5,74	2,23	0,71	100,00	
18. Pati	0,00	78,38	1,76	13,85	6,01	100,00	
19. Kudus	0,00	79,06	0,00	5,64	15,30	100,00	
20. Jepara	2,21	79,97	2,74	12,96	2,12	100,00	
21. Demak	1,61	87,06	5,90	4,81	0,62	100,00	
22. Semarang	7,98	68,89	17,96	5,18	0,00	100,00	
23. Temanggung	7,41	56,96	30,31	5,32	0,00	100,00	
24. Kendal	3,71	80,99	10,56	3,23	1,52	100,00	
25. Batang	2,01	75,88	5,52	16,59	0,00	100,00	
26. Pekalongan	3,13	79,94	11,22	2,94	2,78	100,00	
27. Pemasang	0,00	95,66	0,62	2,87	0,86	100,00	
28. Tegal	8,82	81,27	0,95	8,96	0,00	100,00	
29. Brebes	1,57	79,76	7,64	10,21	0,82	100,00	
71. Kota Magelang	-	-	-	-	-	-	
72. Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	
73. Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	
74. Kota Semarang	1,55	31,23	19,60	47,62	0,00	100,00	
75. Kota Pekalongan	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
76. Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	
Jawa Tengah	5,53	73,91	9,27	9,59	1,70	100,00	

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 5.6.3

**Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut
Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB yang Digunakan, Jawa Tengah 2016**

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB yang Digunakan					Jumlah
	AKDR/IUD/ Spiral	Suntikan KB	Susuk KB/ Implanon/ Pil KB	Tradisional dan lainnya		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
01. Cilacap	14,43	63,14	7,97	12,18	2,27	100,00
02. Banyumas	20,81	59,89	8,64	8,43	2,24	100,00
03. Purbalingga	13,83	66,68	8,00	11,49	0,00	100,00
04. Banjarnegara	5,59	74,21	5,45	11,97	2,78	100,00
05. Kebumen	2,72	67,56	15,99	7,62	6,10	100,00
06. Purworejo	15,18	48,09	24,63	7,76	4,34	100,00
07. Wonosobo	3,68	70,84	18,65	6,02	0,81	100,00
08. Magelang	10,94	56,84	20,79	8,37	3,06	100,00
09. Boyolali	9,38	76,28	10,41	3,92	0,00	100,00
10. Klaten	5,59	76,08	11,75	3,84	2,73	100,00
11. Sukoharjo	2,26	83,32	1,41	6,95	6,05	100,00
12. Wonogiri	9,05	58,36	6,49	22,11	3,98	100,00
13. Karanganyar	19,30	65,07	5,42	8,86	1,35	100,00
14. Sragen	13,88	74,48	1,93	9,72	0,00	100,00
15. Grobogan	0,74	74,60	4,57	15,81	4,29	100,00
16. Blora	1,96	79,12	4,26	10,15	4,51	100,00
17. Rembang	2,27	84,82	4,57	6,84	1,51	100,00
18. Pati	3,19	75,04	2,25	15,41	4,10	100,00
19. Kudus	1,18	77,14	1,90	17,88	1,90	100,00
20. Jepara	1,07	86,64	2,10	8,44	1,75	100,00
21. Demak	3,51	83,95	5,32	5,78	1,44	100,00
22. Semarang	8,44	67,38	14,61	7,09	2,48	100,00
23. Temanggung	8,62	54,82	30,84	4,32	1,39	100,00
24. Kendal	2,96	82,35	8,50	5,26	0,93	100,00
25. Batang	1,87	74,94	5,10	14,67	3,42	100,00
26. Pekalongan	4,46	79,66	8,10	5,31	2,47	100,00
27. Pemasang	4,54	87,85	1,91	4,47	1,22	100,00
28. Tegal	10,68	77,53	2,48	7,82	1,50	100,00
29. Brebes	3,33	77,64	6,85	10,08	2,10	100,00
71. Kota Magelang	28,04	43,75	13,47	8,73	6,01	100,00
72. Kota Surakarta	39,70	37,65	0,00	12,90	9,75	100,00
73. Kota Salatiga	15,11	50,82	20,37	10,06	3,64	100,00
74. Kota Semarang	17,55	52,64	8,19	8,66	12,96	100,00
75. Kota Pekalongan	10,44	80,14	1,99	7,43	0,00	100,00
76. Kota Tegal	2,92	72,48	17,86	6,74	0,00	100,00
Jawa Tengah	7,48	72,31	7,99	9,38	2,84	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : bps3300@bps.go.id

ISBN: 978-602-5419-02-7



9 786025 419027